

**ANALISIS PENGARUH PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN  
AKTIVA, EFISIENSI, DAN KINERJA KEUANGAN  
BUMD DI KABUPATEN WONOSOBO**

**Tesis**

untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S-2  
Program Studi Magister Manajemen



Diajukan oleh  
**MARIO ADI WIBOWO**  
151302837

**Kepada**  
**MAGISTER MANAJEMEN**  
**STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA**  
**2017**

TESIS

**ANALISIS PENGARUH PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN  
AKTIVA, EFISIENSI, DAN KINERJA KEUANGAN  
BUMD DI KABUPATEN WONOSOBO**

Diajukan oleh  
**MARIO ADI WIBOWO**  
151302837

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

Pada tanggal .....

**Dosen Penguji I**

.....  
**Dosen Penguji II/  
Pembimbing**

**Dosen Penguji III**  
.....

dan telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Magister

**Mengetahui,  
PROGRAM MASGISTER MANAJEMEN  
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA**

**DIREKTUR**  
.....

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, September 2017

Mario Adi Wibowo

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Aktiva, Efisiensi, dan Kinerja Keuangan BUMD di Kabupaten Wonosobo”, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-2 Program Studi Magister Manajemen Widya Wiwaha Yogyakarta.

Pembuatan laporan penelitian ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak yang dengan tulus dan sabar membantu dan memberikan dorongan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas segala curahan nikmat, rahmat, petunjuk dan hidayah Nya yang melimpah kepada penulis.
2. Bapak Drs. Muda Setia Hamid, MM, Ak dan Bapak Prof. Dr. Abdul Halim, MBA, Ak selaku dosen pembimbing yang dengan segala kesabaran dan kebaikan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan, serta dorongan kepada penulis sehingga pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan laporan penelitian ini dengan baik.
3. Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta beserta segenap dosen, staf tata usaha dan pengelola Wonosobo yang telah memberikan pelayanan tulus kepada penulis

selama menempuh kuliah di Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.

4. Ibunda Dwi Nurwianti dan Ayahanda Winarno Almarhum yang dengan penuh ketulusan dan rasa sayang selalu memberikan do'a, dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis.
5. My beloved Ahoy, istri tercinta Hikmawati Khoirunisa yang selalu menemani.
6. Anakku tersayang Aimo Kei Dlwyn Hironasa yang turut mengiringi perjalanan penulisan penelitian ini.
7. Mbak Isti, Siti Faizah, Siti Khotimah, Giska Rusmalita atas semua bantuannya, you all the best. Tidak lupa Amoy dan Cuey teman saat lembur.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya penulisan laporan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap, semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.

Yogyakarta, September 2017

Mario Adi Wibowo

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
INTISARI.....	xiii
1 BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
2 BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Manajemen Keuangan Daerah .....	9
2.2 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).....	10
2.2.1 Pengertian BUMD .....	10
2.2.2 Dasar Hukum BUMD .....	11
2.2.3 Ciri-Ciri BUMD.....	13
2.2.4 Tujuan Pendirian BUMD.....	15
2.2.5 Fungsi dan Peran BUMD.....	15
2.3 Penyertaan Modal.....	16
2.4 Pertumbuhan Aktiva.....	18
2.5 Efisiensi .....	20
2.6 Kinerja Keuangan.....	20

2.7	Penelitian Terdahulu.....	21
2.8	Kerangka Pemikiran.....	23
3	BAB III METODA PENELITIAN.....	24
3.1	Disain Penelitian.....	24
3.2	Definisi Operasional.....	24
3.3	Populasi dan Sampel.....	26
3.4	Instrumen Penelitian.....	28
3.5	Pengumpulan Data.....	29
3.6	Metoda Analisis Data.....	30
4	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1	Gambaran Umum PD BPR BKK Wonosobo.....	34
4.2	Gambaran Umum PT BPD Jawa Tengah.....	39
4.3	Gambaran Umum PD BPR Bank Wonosobo.....	45
4.4	Analisis Data.....	49
4.4.1	Deskripsi Data.....	52
4.4.2	Uji Normalitas Data.....	54
4.5	Pengujian Regresi Linier Sederhana.....	56
4.5.1	Uji Regresi Pengaruh Penyertaan Modal (X) Terhadap Pertumbuhan Aktiva (Y1) Pada PD BPR BKK Wonosobo Tahun 2011-2015.....	56
4.5.2	Uji Regresi Pengaruh Penyertaan Modal (X) Terhadap Efisiensi (Y2) Pada PD BPR BKK Wonosobo Tahun 2011-2015.....	57
4.5.3	Uji Regresi Pengaruh Penyertaan Modal (X) Terhadap Kinerja Keuangan (Y3) Pada PD BPR BKK Wonosobo Tahun 2011-2015.....	59
4.5.4	Uji Regresi Pengaruh Penyertaan Modal (X) Terhadap Pertumbuhan Aktiva (Y1) Pada PT BPD Jawa Tengah Tahun 2011-2015.....	60
4.5.5	Uji Regresi Pengaruh Penyertaan Modal (X) Terhadap Efisiensi (Y2) Pada PT BPD Jawa Tengah Tahun 2011-2015.....	62
4.5.6	Uji Regresi Pengaruh Penyertaan Modal (X) Terhadap Kinerja Keuangan (Y3) Pada PT BPD Jawa Tengah Tahun 2011-2015.....	63
4.5.7	Uji Regresi Pengaruh Penyertaan Modal (X) Terhadap Pertumbuhan Aktiva (Y1) Pada PD BPR Bank Wonosobo Tahun 2011-2015.....	65
4.5.8	Uji Regresi Pengaruh Penyertaan Modal (X) Terhadap Efisiensi (Y2) Pada PD BPR Bank Wonosobo Tahun 2011-2015.....	66

4.5.9	Uji Regresi Pengaruh Penyertaan Modal (X) Terhadap Kinerja Keuangan (Y3) Pada PD BPR Bank Wonosobo Tahun 2011-2015 .....	68
4.6	Pembahasan .....	69
4.6.1	Pengaruh Penyertaan Modal (X) Terhadap Pertumbuhan Aktiva (Y1) Pada Tiga BUMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2015 .....	69
4.6.2	Pengaruh Penyertaan Modal (X) Terhadap Efisiensi (Y2) Pada Tiga BUMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2015 .....	70
4.6.3	Pengaruh Penyertaan Modal (X) Terhadap Kinerja Keuangan (Y3) Pada Tiga BUMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2015 .....	71
4.7	Pembahasan Menyeluruh Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Aktiva, Efisiensi, Dan Kinerja Keuangan BUMD di Kabupaten Wonosobo .....	72
5	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	74
5.1	Kesimpulan.....	74
5.2	Saran.....	75
	DAFTAR PUSTAKA .....	76
	LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	79

STIE Widya Wiwaha  
 Jangan Plagiat



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkembangan Peraturan Perundangan Terkait Manajemen Keuangan Daerah .....	10
Tabel 4.1	Pemegang Saham Bank Jateng .....	41
Tabel 4.2	Laporan Neraca dan Laba Rugi PD BPR BKK Wonosobo (Data Diolah) .....	49
Tabel 4.3	Laporan Neraca dan Laba Rugi PT BPD Jawa Tengah (Data Diolah)...	50
Tabel 4.4	Laporan Neraca dan Laba Rugi PD BPR Bank Wonosobo (Data Diolah) .....	51
Tabel 4.5	Hasil Perhitungan Operasional Variabel Penyertaan Modal.....	52
Tabel 4.6	Hasil Perhitungan Operasional Variabel Pertumbuhan Aktiva.....	52
Tabel 4.7	Hasil Perhitungan Operasional Variabel Efisiensi.....	53
Tabel 4.8	Hasil Perhitungan Operasional Variabel Kinerja Keuangan.....	54
Tabel 4.9	Hasil Perhitungan Operasional Variabel Tiga Objek Penelitian.....	54
Tabel 4.10	Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana PD BPR BKK Wonosobo (Penyertaan Modal dan Pertumbuhan Aktiva) .....	56
Tabel 4.11	Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana PD BPR BKK Wonosobo (Penyertaan Modal dan Efisiensi) .....	58
Tabel 4.12	Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana PD BPR BKK Wonosobo (Penyertaan Modal dan Kinerja Keuangan) .....	59
Tabel 4.13	Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana PT BPD Jawa Tengah (Penyertaan Modal dan Pertumbuhan Aktiva) .....	61
Tabel 4.14	Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana PT BPD Jawa Tengah (Penyertaan Modal dan Efisiensi) .....	62
Tabel 4.15	Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana PT BPD Jawa Tengah (Penyertaan Modal dan Kinerja Keuangan) .....	64
Tabel 4.16	Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana PD BPR Bank Wonosobo (Penyertaan Modal dan Pertumbuhan Aktiva) .....	65
Tabel 4.17	Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana PD BPR Bank Wonosobo (Penyertaan Modal dan Efisiensi) .....	67
Tabel 4.18	Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana PD BPR Bank Wonosobo (Penyertaan Modal dan Kinerja Keuangan) .....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	23
Gambar 3.1	Kaitan antara Tujuan Penelitian, Data dan Instrumen Pengumpulan Data .....	29
Gambar 4.1	Logo PD BPR BKK Wonosobo.....	36
Gambar 4.2	Bagan Struktur Organisasi PD BPR BKK Wonosobo.....	37
Gambar 4.3	Bagan Struktur Organisasi Kantor Pusat Operasional PD BPR BKK Wonosobo.....	38
Gambar 4.4	Bagan Struktur Organisasi Kantor Cabang PD BPR BKK Wonosobo.....	38
Gambar 4.5	Logo PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.....	41
Gambar 4.6	Struktur Organisasi PT BPD Jawa Tengah.....	44
Gambar 4.7	Logo dan Struktur Organisasi PD BPR Bank Wonosobo.....	48

STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Uji Normalitas Data Penyertaan Modal*Pertumbuhan Aktiva (PD BPR BKK Wonosobo) .....	79
Lampiran 2	Uji Normalitas Data Penyertaan Modal*Efisiensi (PD BPR BKK Wonosobo).....	79
Lampiran 3	Uji Normalitas Data Penyertaan Modal*Kinerja Keuangan (PD BPR BKK Wonosobo) .....	80
Lampiran 4	Uji Normalitas Data Penyertaan Modal*Pertumbuhan Aktiva (PT BPD Jawa Tengah) .....	80
Lampiran 5	Uji Normalitas Data Penyertaan Modal*Efisiensi (PT BPD Jawa Tengah) .....	81
Lampiran 6	Uji Normalitas Data Penyertaan Modal*Kinerja Keuangan (PT BPD Jawa Tengah) .....	81
Lampiran 7	Uji Normalitas Data Penyertaan Modal*Pertumbuhan Aktiva (PD BPR Bank Wonosobo ) .....	82
Lampiran 8	Uji Normalitas Data Penyertaan Modal*Efisiensi (PD BPR Bank Wonosobo ).....	82
Lampiran 9	Uji Normalitas Data Penyertaan Modal*Kinerja Keuangan (PD BPR Bank Wonosobo ) .....	83
Lampiran 10	Analisis Regresi Linear Penyertaan Modal*Pertumbuhan Aktiva (PD BPR BKK Wonosobo).....	84
Lampiran 11	Analisis Regresi Linear Penyertaan Modal*Efisiensi (PD BPR BKK Wonosobo).....	85
Lampiran 12	Analisis Regresi Linear Penyertaan Modal*Kinerja Keuangan (PD BPR BKK Wonosobo) .....	86
Lampiran 13	Analisis Regresi Linear Penyertaan Modal*Pertumbuhan Aktiva (PT BPD Jawa Tengah) .....	87
Lampiran 14	Analisis Regresi Linear Penyertaan Modal*Efisiensi (PT BPD Jawa Tengah) .....	88
Lampiran 15	Analisis Regresi Linear Penyertaan Modal*Kinerja Keuangan (PT BPD Jawa Tengah) .....	89
Lampiran 16	Analisis Regresi Linear Penyertaan Modal*Pertumbuhan Aktiva (PD BPR Bank Wonosobo).....	90
Lampiran 17	Analisis Regresi Linear Penyertaan Modal*Efisiensi (PD BPR Bank Wonosobo).....	91
Lampiran 18	Analisis Regresi Linear Penyertaan Modal*Kinerja Keuangan (PD BPR Bank Wonosobo) .....	92
Lampiran 19	Laporan Keuangan PD BPR BKK Wonosobo 2011/2010 .....	93
Lampiran 20	Laporan Keuangan PD BPR BKK Wonosobo 2013/2012 .....	96
Lampiran 21	Laporan Keuangan PD BPR BKK Wonosobo 2015/2014 .....	101
Lampiran 22	Laporan Keuangan PD BPR Bank Wonosobo 2011/2010 .....	106

Lampiran 23 Laporan Keuangan PD BPR BKK Wonosobo 2013/2012 .....	109
Lampiran 24 Laporan Keuangan PD BPR BKK Wonosobo 2015/2014 .....	115
Lampiran 25 Laporan Keuangan PT BPD Jawa Tengah 2012/2011 .....	119
Lampiran 26 Laporan Keuangan PT BPD Jawa Tengah 2014/2013 .....	120
Lampiran 27 Laporan Keuangan PT BPD Jawa Tengah 2015/2014 .....	121
Lampiran 28 Tabel t .....	122

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## INTISARI

*Penelitian ini bertujuan menguji kembali model penelitian yang dilakukan Sudarno, dkk (2011) dan Izak Kelbulan (2015) dengan obyek penelitian yang berbeda yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Wonosobo. BUMD yang menjadi obyek penelitian adalah PD BPR BKK Wonosobo, PT BPD Jawa Tengah (Bank Jateng), dan PD BPR Bank Wonosobo. Dalam penelitian ini penyertaan modal sebagai variabel independen, sedangkan pertumbuhan aktiva, efisiensi dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen.*

*Data diperoleh dari situs web Otoritas Jasa Keuangan berupa Laporan Keuangan Perbankan sejak tahun buku 2011-2015. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana, dimana yang menjadi variabel independen adalah penyertaan modal diuji secara terpisah satu persatu untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan aktiva, efisiensi, dan kinerja keuangan.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aktiva BUMD di Kabupaten Wonosobo. Kedua, penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap efisiensi BUMD di Kabupaten Wonosobo. Ketiga, penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMD di Kabupaten Wonosobo.*

*Kata kunci : Penyertaan modal, Pertumbuhan aktiva, Efisiensi, dan Kinerja keuangan BUMD di Kabupaten Wonosobo*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Pemerintah Indonesia telah melewati serangkaian proses reformasi sektor publik, khususnya reformasi manajemen keuangan daerah yang ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Reformasi manajemen keuangan daerah tersebut dilakukan dengan mengganti Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut berisi mengenai perlunya dilaksanakan otonomi daerah. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah karena perkembangan kondisi di dalam negeri yang mengidentifikasi bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi) dan kondisi di luar negeri yang menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing pemerintah daerah

(pemda). Daya saing Pemda diharapkan tercapai melalui peningkatan pemandirian yang dapat diraih melalui otonomi daerah.

Upaya yang giat dilakukan dalam rangka pengembangan daerah agar dapat meningkatkan pemandirian adalah dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan daerah. Pemerintah daerah/kabupaten dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan sebagai pembiayaan terhadap pemberdayaan dan pembangunan di daerah secara adil dan merata perlu dilakukan dengan memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui setoran deviden. Dalam susunan PAD, perusahaan BUMD memiliki peranan dalam mengisi pos Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah. Pos ini merupakan pendapatan yang didapat dari bagian laba penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah/kabupaten dalam upaya peningkatan dan pengembangan.

Penyertaan modal pada BUMD merupakan bagian dari investasi jangka panjang daerah dimana jumlah akumulatifnya disajikan dalam Neraca pada sisi Aset. Dalam penganggarannya, penyertaan modal atau investasi ini tidak diakui sebagai belanja, namun dimasukkan sebagai pengeluaran pembiayaan. Di sisi lain, hasil yang diterima dari investasi yang telah dilakukan dikategorikan sebagai PAD. Pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah jika diwujudkan dalam bentuk investasi yang produktif pada suatu perusahaan daerah akan menciptakan tingkat pengembalian yang produktif dan efektif. Hal ini apabila dilakukan dengan menekan biaya operasional dan non operasional (efisien),

meningkatkan pendapatan/penjualan, dan melakukan investasi produktif yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan. Kondisi tersebut dapat terjadi apabila tata kelola terhadap penyertaan modal untuk pertumbuhan aktiva, penciptaan efisiensi dan peningkatan kinerja keuangan dapat dilakukan dengan konsisten oleh manajemen BUMD.

Halim dan Bawono (2011: 97) mengemukakan bahwa diterbitkannya paket undang-undang keuangan yang terdiri dari UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan reformasi kebijakan pengelolaan keuangan. Salah satu hal penting yang diatur dalam paket ketentuan tersebut, adalah adanya kewajiban kepala daerah menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang diperiksa BPK.

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (IHPS, 2014:141-143), BPK melakukan pemeriksaan kegiatan operasional dan asset terhadap 23 BUMD yang terdiri dari 8 BPD/ BPR, 6 PDAM dan BUMD bidang usaha lain. Pemeriksaan kegiatan operasional dan asset BUMD bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai guna mencapai tujuan pengendalian. Selain itu, juga untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 326 temuan yang di dalamnya terdapat 427



permasalahan, yaitu 233 kelemahan sistem pengendalian intern dan 194 permasalahan ketidakpatuhan terhadap perundangan senilai Rp 329,14 miliar.

Hasil pemeriksaan tersebut diantaranya penyimpangan terhadap peraturan yang mengakibatkan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp. 66,38 miliar pada BPD dan BPR pada pemeriksaan yang dilakukan di Bank Aceh, BPD Jateng, BPD NTT, dan BPR Jatim. Permasalahan tersebut diantaranya penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran/ tidak sesuai peruntukan senilai Rp. 29,78 miliar di BPD Jateng, yaitu penyaluran dana sosial kepada yayasan kesejahteraan karyawan belum dimanfaatkan sesuai tujuan program dana sosial yang tercantum dalam SK Direksi. Dana tersebut ternyata digunakan untuk investasi, penempatan dana di perusahaan lain, dan deposito.

Menurut Mahmudi (2010: 26), dalam kebanyakan kasus, kontribusi bagian laba perusahaan daerah belum memberikan andil yang cukup signifikan bagi peningkatan PAD. Bahkan beberapa perusahaan daerah justru membebani APBD karena harus terus disubsidi sementara laba yang dihasilkan relatif masih kecil sehingga belum bisa memberikan deviden yang berarti bagi daerah. Terdapat beberapa masalah terkait dengan kinerja perusahaan daerah, antara lain:

- Lemahnya profesionalisme
- Permasalahan kultur pemerintahan (birokrasi) dan kultur organisasi (bisnis) yang tidak mendukung

- Ketidakharmonisan hubungan pemerintah sebagai *principal* dengan manajemen perusahaan sebagai agen
- Kedudukan hukum perusahaan daerah yang kurang jelas
- Intervensi politik yang terlalu besar
- Sistem rekrutmen pegawai yang kurang transparan, kompetitif, dan fair
- Kurangnya transparansi dan akuntabilitas
- Pemilihan direksi yang tidak melalui prosedur uji kepatutan dan kelayakan (*fit & proper test*) tetapi berdasarkan kedekatan dengan kepala daerah
- Kurang jelasnya kompetensi inti (*core competence*) bisnis perusahaan sehingga tidak fokus pada pasar
- Inefisiensi dalam pengeluaran terutama pada pengeluaran biaya kebijakan (*discretionary expenses*)

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Sudarno, dkk tahun 2011 dari STIE Pelita Indonesia Pekanbaru yang meneliti pengaruh penyertaan modal terhadap pertumbuhan aktiva, efisiensi dan kinerja keuangan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) studi pada BUMD/Perusahaan Daerah di Provinsi Riau. Izak Kelbulan dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2015 juga meneliti pengaruh penyertaan modal Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan aktiva, efisiensi dan kinerja keuangan BUMD di Provinsi DIY. Penelitian ini menguji kembali model penelitian yang dilakukan Sudarno, dkk (2011) dan Izak

Kelbulan (2015) dengan obyek penelitian yang berbeda yaitu BUMD di Kabupaten Wonosobo.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dalam Suara Merdeka pada 17 Oktober 2016 dikatakan bahwa terdapat 15 Perusahaan Daerah (PD) Badan Kredit Kecamatan (BKK) dari 29 di Jateng dalam kondisi kurang sehat. Meski demikian, Pemprov tetap memberikan tambahan modal dengan alasan agar makin mampu beroperasi dan melayani masyarakat. Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto mengatakan kondisi BKK yang berstatus kurang sehat adalah BKK Batang, Pekalongan, Kendal, Tegal, Kota Tegal, Kota Surakarta, Klaten, Sukoharjo, Magelang, Banjarnegara, Brebes, Kebumen, Wonosobo, dan Rembang. Berstatus tidak sehat BKK Tayu, Pati. Jumlah modal seluruh BKK yang kurang sehat Rp. 36,9 miliar atau 55,45% dari total modal 29 BKK sebesar Rp. 66,55 miliar. Kepala Biro Perekonomian Jateng Dadang Somantri menjelaskan kondisi BPR BKK dan BKK tak semua sehat. Kondisi keuangan dari 33 BPR BKK, 32 sehat (nilai diatas 81) dan satu cukup sehat (nilai 66-81). Dari 29 BKK, 21 dalam kondisi sehat, enam tidak sehat (nilai di bawah 51), dan dua kurang sehat (nilai 51-66). Kriteria kondisi keuangan berdasarkan penilaian dari OJK (berita.suaramerdeka.com, 2016: 5).

Pemprov Jateng memberikan suntikan modal Rp. 50 miliar dari APBD 2016 pada sejumlah BUMD, namun sejumlah BUMD masih belum menunjukkan

laba yang positif. Mencermati berbagai permasalahan yang dihadapi oleh BUMD pada umumnya, dan khususnya yang dihadapi oleh BUMD di Kabupaten Wonosobo, maka perlu adanya analisis mengenai pengaruh penyertaan modal pemerintah daerah terhadap pertumbuhan aktiva, efisiensi, dan kinerja keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pertanyaan penelitian yang akan diajukan untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan aktiva BUMD di Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimanakah pengaruh penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah terhadap efisiensi BUMD di Kabupaten Wonosobo?
3. Bagaimanakah pengaruh penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan BUMD di Kabupaten Wonosobo?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui/ menganalisis pengaruh penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan aktiva BUMD di Kabupaten Wonosobo

2. Untuk mengetahui/ menganalisis pengaruh penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah terhadap efisiensi BUMD di Kabupaten Wonosobo
3. Untuk mengetahui/ menganalisis pengaruh penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan BUMD di Kabupaten Wonosobo

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan informasi terbaru perihal pentingnya penyertaan modal yang bukan saja dikaitkan dengan pertumbuhan aktiva dan kinerja keuangan BUMD tetapi juga bagaimana kaitannya dengan efisiensi.

#### **2. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penyertaan modal dari pemerintah daerah, diharapkan penelitian ini berkontribusi memberikan masukan kepada pihak BUMD, baik jajaran direksi maupun jajaran di bawahnya untuk meningkatkan pertumbuhan aktiva yang baik, mengurangi *inefisiensi* biaya, serta memperbaiki kinerja yang lebih baik.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pengaruh penyertaan modal Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan aktiva, efisiensi, dan kinerja keuangan BUMD di Kabupaten Wonosobo, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai teori sebagai landasan untuk memecahkan persoalan yang ada. Sebab hal ini dirasa sangat penting sebagai pedoman untuk menentukan alternatif pemecahan masalah. Secara garis besar akan dibahas mengenai :

#### **2.1 Manajemen Keuangan Daerah**

Mahmudi (2010: 2) mengemukakan bahwa reformasi manajemen keuangan daerah di Indonesia dapat dikatakan cukup terlambat hampir dua dasawarsa dibandingkan dengan reformasi yang telah dilakukan oleh negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat. Meskipun relatif terlambat, reformasi manajemen keuangan sektor publik di Indonesia dapat dikatakan mengalami kemajuan yang pesat.

Perjalanan reformasi manajemen keuangan daerah jika dilihat dari aspek historis di Indonesia dapat dibagi dalam tiga fase, yaitu : 1) era pra-otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (1974-1999), 2) era transisi otonomi (2000-2003), dan 3) era pascatransisi (2004-sekarang).

Tabel 2.1  
Perkembangan Peraturan Perundangan Terkait Manajemen Keuangan Daerah

Pra-otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal	Transisi Otonomi (Reformasi Tahap I)	Pascatransisi Otonomi (Reformasi Tahap II)
UU No.5 Tahun	UU No.22 Tahun 1999 UU No.25 Tahun 1999	UU No.17 Tahun 2003 UU No.1 Tahun 2004 UU No.15 Tahun 2004 UU No.25 Tahun 2004 UU No.32 Tahun 2004 UU No.33 Tahun 2004
PP No.5 Tahun 1975 PP No.6 Tahun 1975	PP No.105 Tahun 2000 PP No.108 Tahun 2000	
Manual Administrasi Keuangan Daerah	Kepmendagri No.29 Tahun 2002	UU No.24 Tahun 2005 UU No.58 Tahun 2005
	Peraturan Daerah : Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Permendagri No.13 Tahun 2006 (Direvisi menjadi Permendagri No.59 Tahun 2007)
	Peraturan KDH	

(Sumber : Manajemen Keuangan Daerah, 2010: 3)

## 2.2 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

### 2.2.1 Pengertian BUMD

Istilah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak terlepas dari kehadiran Undang-Undang No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, akan tetapi pada Undang-undang tersebut tidak ditemukan istilah BUMD. Pada Pasal 2 Undang-Undang No 5 Tahun 1962 memberikan penjelasan bahwa Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah

yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang. Meskipun pada Pasal tersebut menunjukkan ciri bahwa Perusahaan Daerah merupakan badan hukum dengan harta yang terpisah, namun tidak menunjukkan apakah Perusahaan Daerah merupakan BUMD.

Istilah BUMD terdapat di dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mendirikan BUMD, didirikan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya pada Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Rumusan Pasal dari Undang-undang tersebut juga tidak memberikan definisi maupun batasan yang jelas tentang BUMD.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dan UU No 32 Th 2004 telah memberikan pengertian BUMD secara jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 40 memberi pengertian bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

### **2.2.2 Dasar Hukum BUMD**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 18 Ayat (1) dan (2), Daerah memiliki hak dan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah dan mengelola kekayaan



daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya yaitu daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah juga diharapkan dapat meningkatkan penghasilan daerah dengan menggali potensi yang ada. Salah satunya adalah dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memanfaatkan sumber daya di daerah yang hasilnya diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dasar hukum pembentukan BUMD adalah berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Hal-hal yang diatur diantaranya mengenai sifat, tujuan dan lapangan usaha BUMD, pengawasan BUMD, dan kepemilikan BUMD. Pada saat itu perekonomian daerah belum terbangun dengan baik, penyediaan jasa kepentingan umum bagi masyarakat di daerah belum terselenggara dengan baik, dan persaingan dunia usaha belum berkembang seperti kondisi saat ini dikarenakan terbatasnya jumlah pelaku usaha. Mengingat perubahan dan perkembangan sistem pemerintahan, ketatanegaraan serta pengaruh era globalisasi maka Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian saat ini.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan UU No 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana keduanya merupakan payung hukum pengaturan BUMD selama ini. Undang-undang ini memberikan implikasi terhadap pengaturan BUMD yang selama ini telah ada di Indonesia. Secara khusus mengatur BUMD pada BAB XII terdiri dari 12 Pasal, mulai dari Pasal 331 sampai dengan Pasal 343, serta tersebar di beberapa Pasal seperti Pasal 1 angka 40, Pasal 134 Ayat (1) huruf c, Pasal 188 Ayat (1) huruf c, Pasal 298 Ayat (5) huruf c, Pasal 304 Ayat (1) dan (2), Pasal 320 Ayat (2) huruf g, Pasal 402 Ayat (2), Pasal 405, dan Pasal 409.

### **2.2.3 Ciri-Ciri BUMD**

Bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 331 Ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2014 terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) dan Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA).

Perumda sebagaimana secara khusus diatur pada Pasal 334 sampai dengan Pasal 338, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal perusahaan umum daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah, perusahaan umum daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah.

Perumda dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. (Pasal 334)

- b. Organ perusahaan umum daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas. (Pasal 335)
- c. Laba Perumda ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba Perumda yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal. (Pasal 336)
- d. Perumda dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perumda agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan professional. (Pasal 337)
- e. Perumda dapat dibubarkan. Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Perda. Kekayaan Perumda yang telah dibubarkan dan menjadi hak daerah dikembalikan kepada daerah. (Pasal 338)

Perseroda juga mendapatkan pengaturan khusus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 339 sampai dengan Pasal 342, memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Perseroda setelah pendiriannya ditetapkan dengan Perda, selanjutnya pembentukan badan

hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. (Pasal 339)

- b. Organ Perseroda terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. (Pasal 340)
- c. Perseroda dapat membentuk anak perusahaan dan/ atau memiliki saham pada perusahaan lain. (Pasal 341)
- d. Perseroda dapat dibubarkan. Kekayaan daerah hasil pembubaran Perseroda yang menjadi hak daerah dikembalikan kepada daerah. (Pasal 342)

#### **2.2.4 Tujuan Pendirian BUMD**

Menurut Pasal 1 Ayat 4 UU Nomor 23 Tahun 2014 pendirian BUMD bertujuan untuk :

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan
- c. Memperoleh laba dan/ atau keuntungan.

#### **2.2.5 Fungsi dan Peran BUMD**

Salah satu alasan dibentuknya BUMD adalah berdasarkan pada bunyi ketentuan UUD 1945 Pasal 33 khususnya ayat (2) dan (3) yang mengandung

maksud bahwa cabang-cabang produksi penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bersama dengan BUMN, BUMD merupakan pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional yang didasarkan kepada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi sehingga memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Fungsi dan peran BUMD yaitu :

- a. Melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah.
- b. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah.
- c. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha.
- d. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik.
- e. Menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.

### **2.3 Penyertaan Modal**

Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah pusat/ daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/ daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham negara

atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 sebagaimana diatur dalam ketentuan umum bab 1 angka 7 yang dimaksud dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah pada BUMD.

Dalam bab 1 angka 12, Modal dasar adalah modal secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan peranan BUMD baik sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maupun kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan perusahaan. Sedangkan angka 13 menyebutkan bahwa Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemegang saham.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD bertujuan untuk meningkatkan :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pertumbuhan ekonomi Daerah
3. Pembangunan ekonomi berkelanjutan
4. Kemampuan daya saing BUMD
5. Kesejahteraan masyarakat

## 6. Penyerapan tenaga kerja

### 2.4 Pertumbuhan Aktiva

Untuk menggambarkan posisi keuangan pada saat tertentu, neraca mempunyai tiga unsur laporan keuangan yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Aktiva merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa depan. Aktiva dapat disub-klasifikasikan lebih jauh menjadi lima, yaitu :

- a. Aktiva lancar, yaitu aktiva yang manfaat ekonominya diharapkan akan diperoleh dalam waktu satu tahun atau kurang (atau siklus operasi normal), misalnya kas, surat berharga, persediaan, piutang, dan persekot biaya.
- b. Investasi jangka panjang, yaitu penanaman modal yang biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan tetap atau untuk menguasai perusahaan lain dan jangka waktunya lebih dari satu tahun, misalnya investasi saham, investasi obligasi.
- c. Aktiva tetap, yaitu aktiva yang memiliki substansi (wujud) fisik, digunakan dalam operasi normal perusahaan (tidak dimaksudkan untuk dijual) dan memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu tahun. Termasuk dalam sub-klasifikasi aktiva ini antara lain tanah, gedung, kendaraan, dan mesin serta peralatan.

- d. Aktiva yang tidak berwujud, yaitu aktiva yang tidak mempunyai substansi fisik dan biasanya berupa hak atau hak istimewa yang memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun. Termasuk dalam sub-klasifikasi aktiva ini misalnya *patent*, *goodwill*, *royalty*, *copyright* (hak cipta), *trade name/ trade mark* (merek/ nama dagang), *franchise* dan *license* (lisensi).
- e. Aktiva lain-lain, yaitu aktiva yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari empat sub-klasifikasi tersebut, misalnya beban ditanggungkan, piutang kepada direksi, deposito, pinjaman karyawan (Darminto, 2011:18).

Manfaat ekonomi di masa depan yang terwujud dalam aktiva tetap adalah potensi aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas (dan setara kas) kepada perusahaan. Manfaat ini dapat mengalir ke dalam perusahaan dengan cara digunakan dalam produksi barang dan jasa, dipertukarkan dengan aktiva lain, digunakan untuk menyelesaikan kewajiban atau dibagikan kepada para pemilik perusahaan.

Pertumbuhan aktiva adalah perubahan (peningkatan atau penurunan) total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam pengukuran rasio pertumbuhan pada analisis rasio keuangan sektor publik, Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan aset mengukur perubahan dari aset antara satu periode dengan periode yang lain.



## 2.5 Efisiensi

Menurut Mardiasmo (sebagaimana dikutip dalam Halim, Restianto & Karman, 2010: 90-91) menyatakan bahwa prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi akuntabilitas, *value for money*, kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik (*probity*), transparansi dan pengendalian.

*Value for money* berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Sedangkan efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan *output* yang maksimal (berdaya guna).

## 2.6 Kinerja Keuangan

Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan sangat diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas), dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut.

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran kinerja perusahaan disajikan pada laporan keuangan yang disebut laporan laba rugi. Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau

sebagai dasar bagi ukuran lainnya, misalnya *return of investmen* atau *earning per share*. Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih ini adalah penghaslan (*income*) dan beban (*expense*). Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban ini bergantung pada konsep modal dan pemeliharaan modal yang digunakan. (Darminto, 2011:11)

Masing-masing unsur yang berkaitan dengan kinerja perusahaan tersebut didefinisikan sebagai berikut :

a. Penghasilan (*Income*)

Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi (setoran penanam modal).

b. Beban (*Expense*)

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarno, dkk (2011) menunjukkan bahwa, penyertaan modal belum mempunyai kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan aktiva, bahkan tidak memiliki daya dorong menciptakan

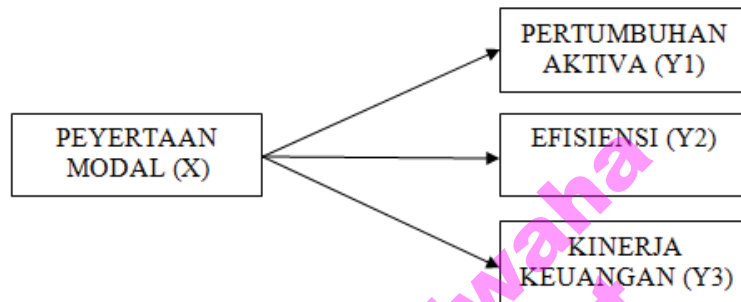
pertumbuhan aktiva. Hal ini mengisyaratkan bahwa apabila penyertaan modal dilakukan penambahan pada perusahaan BUMD maka justru akan semakin tidak ada pertumbuhan aktiva dikarenakan penambahan tersebut tidak dipergunakan untuk investasi produktif melainkan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran (biaya) operasional perusahaan. Dalam hal efisiensi, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan modal berpotensi tinggi menciptakan efisiensi namun masih mempunyai hubungan terbalik (negatif), artinya semakin dilakukan penambahan penyertaan modal berarti semakin memunculkan inefisiensi yang lebih besar pada BUMD. Begitu pula jika penyertaan modal dilakukan penambahan/peningkatan ternyata tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan. Diindikasikan karena lebih banyak dipergunakan untuk biaya operasional sehingga biaya menjadi besar dan kinerja keuangan yang diwujudkan oleh laba menjadi rendah bahkan merugi semakin besar pada BUMD.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Izak Kelbulan (2015), hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan aktiva BUMD di Provinsi DIY, namun pengaruh yang diberikan adalah pengaruh negatif. Kedua, penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap efisiensi BUMD di Provinsi DIY. Ketiga, penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMD di Provinsi DIY, dan pengaruh yang diberikan adalah pengaruh negatif.

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran



Dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Terdapat pengaruh positif signifikan penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pertumbuhan aktiva BUMD di Kabupaten Wonosobo.
- H2 : Terdapat pengaruh positif signifikan penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap efisiensi BUMD di Kabupaten Wonosobo.
- H3 : Terdapat pengaruh positif signifikan penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan BUMD di Kabupaten Wonosobo.

## **BAB III**

### **METODA PENELITIAN**

Metoda penelitian ini digunakan sebagai pedoman agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dan mengupayakan penyelesaian masalah menjadi lebih sistematis dan terarah sehingga dapat memenuhi tujuan yang akan dicapai.

#### **3.1 Disain Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yaitu semua informasi diwujudkan dalam angka dan dianalisis berdasarkan analisis statistik. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh variabel bebas yaitu penyertaan modal pemerintah daerah (X) terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan aktiva (Y1), efisiensi (Y2), dan kinerja keuangan (Y3).

#### **3.2 Definisi Operasional**

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan, maka definisi operasional masing-masing variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Penyertaan Modal

Dalam pengukuran Rasio Solvabilitas pada analisis rasio keuangan, Rasio Modal dengan Total Aset menunjukkan beberapa besarnya modal sendiri

yang tertanam dalam aktiva serta *margin of protection* atau tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditur.

Operasional variabelnya :

$$\text{Penyertaan Modal (X)} \quad : \quad \frac{\text{Ekuitas}}{\text{Total Aktiva}}$$

2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah :

a. Pertumbuhan Aktiva

Aktiva merupakan bentuk dari penanaman modal perusahaan, bentuk-bentuknya dapat berupa harta kekayaan atau hak atas kekayaan atau jasa yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan. Pertumbuhan aktiva adalah perubahan (peningkatan atau penurunan) total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi pertumbuhan aktiva dihitung sebagai persentase perubahan aset pada bulan tertentu terhadap bulan sebelumnya. Operasional variabelnya :

$$\text{Pertumbuhan Aktiva (Y}_1\text{)} \quad : \quad \frac{\text{Aset tahun}_t - \text{Aset tahun}_{t-1}}{\text{Aset tahun}_{t-1}}$$

b. Efisiensi

Dalam pengukuran Rasio Profitabilitas pada analisis rasio keuangan, Rasio Biaya Operasional Cost Ratio (OCR) mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan perusahaan melakukan kegiatan operasional.

Operasional variabelnya :

Efisiensi ( $Y_2$ ) : \_\_\_\_\_

c. Kinerja Keuangan

Salah satu alasan utama mengapa mengoperasionalkan perusahaan adalah untuk menghasilkan laba yang akan bermanfaat bagi para pemegang saham. Ukuran keberhasilan dari pencapaian alasan ini adalah angka *return of common stockholder's equity* yang berhasil dicapai. Dalam pengukuran Rasio Profitabilitas pada analisis rasio keuangan, *Return on Equity* (ROE) mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan bersih dikaitkan dengan pembayaran deviden. Operasional variabelnya :

Kinerja Keuangan ( $Y_2$ ) : \_\_\_\_\_

### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah BUMD yang mendapat penyertaan modal dari Pemerintah Daerah yang didirikan untuk tujuan peningkatan PAD dan untuk melayani kepentingan publik.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 BAB III Pasal 5, diuraikan ruang lingkup penyertaan modal daerah pada BUMD dalam peraturan daerah Kabupaten Wonosobo meliputi:

- PT. BPD Jawa Tengah;
- Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonosobo (PD. BPR BKK Wonosobo);
- Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kertek (PD. BKK Kertek);
- Perusahaan Daerah Bhakti Husada (PD. Bhakti Husada);
- PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (PT. PRPP Jawa Tengah); dan
- Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo (PD. BPR Bank Wonosobo).

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi. Pada umumnya peneliti menginginkan untuk mempunyai subjek penelitian yang cukup banyak agar data yang diperoleh cukup banyak pula. Dengan data yang banyak gambaran kesimpulannya menjadi mantap. Namun tidak selamanya keinginan peneliti tersebut terpenuhi, untuk itu peneliti membatasi banyaknya subjek penelitian disesuaikan dengan kemampuan yang ada.

Menurut Arikunto (2003: 120), peneliti harus menentukan wakil dari keseluruhan subjek yang harus diteliti agar diperoleh sampel yang betul-betul merupakan wakil dari populasi untuk subjek-subjek mana hasil penelitiannya akan digeneralisasikan. Dengan kata lain peneliti harus betul-betul memikirkan bagaimana menentukan sampel yang representatif. Pemilihan wakil dari seluruh subjek penelitian tersebut disebut sampling. Jadi sampling adalah pemilihan



sejumlah subjek penelitian sebagai wakil dari populasi sehingga dihasilkan sampel yang mewakili populasi dimaksud.

Dalam pemilihan sampel, menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang diambil ditentukan sendiri dengan pertimbangan beberapa kriterianya sebagai berikut:

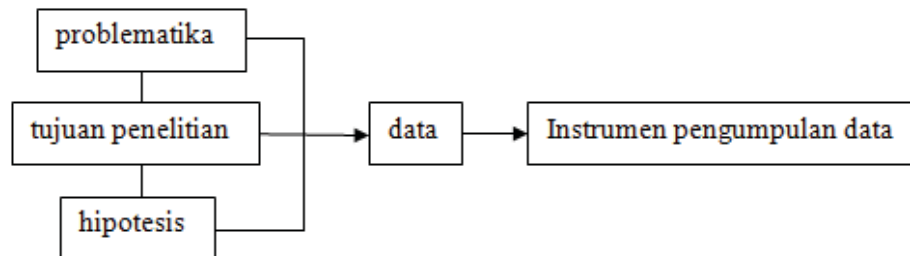
1. BUMD/Perusahaan Daerah yang didirikan untuk tujuan peningkatan PAD
2. BUMD/Perusahaan Daerah yang didirikan untuk melayani kepentingan publik
3. BUMD/Perusahaan Daerah yang menyajikan laporan keuangan Tahun Anggaran 2011-2015 yang dipublikasikan.

Tiga sampel yang dipilih adalah PD BPR BKK Wonosobo, PT BPD Jawa Tengah (Bank Jateng), dan PD BPR Bank Wonosobo.

### **3.4 Instrumen Penelitian**

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah. Instrumen penelitian yang diartikan sebagai alat bantu merupakan saran yang diwujudkan dalam benda, misalnya angket (*questionnaire*), daftar cocok (*checklist*) atau pedoman wawancara (*interview guide* atau *interview schedule*), lembar pengamatan atau panduan pengamatan (*observation sheet* atau *observation schedule*), soal tes, inventori (*inventory*), skala (*scala*), dan lain sebagainya (Arikunto, 2003: 134).

Gambar 3.1  
Kaitan antara Tujuan Penelitian, Data dan Instrumen Pengumpulan Data



Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mempermudah dalam melaksanakan tugas mengumpulkan data untuk mencari jawaban yang dirumuskan dalam problematika, untuk mencari sesuatu yang disebutkan menjadi tujuan penelitian dan sebagai bahan untuk membuktikan hipotesis. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa dokumentasi yaitu Laporan Neraca yang terdiri dari Aktiva, Pasiva (Liabilitas dan Ekuitas) dan Laporan Laba Rugi (Pendapatan dan Beban).

### 3.5 Pengumpulan Data

Arikunto (2003: 116) mendefinisikan subjek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan dipermasalahkan. Sedangkan sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca, atau bertanya tentang data. Secara umum sumber data dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yang disingkat dengan 3 P :

1. Person (orang), tempat peneliti bertanya mengenai variabel yang sedang diteliti.

2. Paper (kertas), berupa dokumen, warkat, keterangan, arsip, pedoman, surat keputusan dan sebagainya tempat peneliti membaca dan mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan data penelitiannya.
3. Place (tempat), berupa ruang, laboratorium (yang berisi perlengkapan), bengkel, kelas dan sebagainya tempat berlangsungnya suatu kegiatan yang berhubungan dengan data penelitian.

Penelitian ini mengambil subjek penelitian yaitu studi pada tiga BUMD di Kabupaten Wonosobo yaitu PD BPR BKK Wonosobo, PT BPD Jawa Tengah (Bank Jateng), dan PD BPR Bank Wonosobo. Jenis sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan (*annual report*). Guna mempermudah pengumpulan data untuk mendukung kelancaran, analisis akan menggunakan sumber data berupa Laporan Keuangan Publikasi PD BPR BKK Wonosobo, PT BPD Jawa Tengah (Bank Jateng), dan PD BPR Bank Wonosobo sejak tahun 2011 sampai tahun 2015.

### **3.6 Metoda Analisis Data**

Sebelum peneliti menentukan teknik statistik yang akan digunakan untuk menganalisis data, terlebih dahulu harus melakukan pengujian terhadap data yang dimiliki. Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan teknik statistik adalah penyebaran data. Apabila data yang dianalisis berdistribusi normal maka peneliti boleh menggunakan teknik statistik parametrik, sedangkan

apabila data yang diolah tidak merupakan sebaran normal, peneliti harus menggunakan statistik non parametrik (Arikunto, 2003: 392).

Uji normalitas sampel atau menguji normal tidaknya sampel adalah mengadakan pengujian terhadap normal tidaknya sebaran data yang akan dianalisis. Menggunakan program *SPSS 17.0 for Windows*, penelitian ini melakukan uji normalitas data dengan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*. Uji normalitas ini untuk mengetahui apakah distribusi frekuensi masing-masing variabel normal atau tidak dilakukan dengan melihat harga p. Jika harga p lebih besar dari 0,05 berarti distribusi data normal, sedangkan jika harga p lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka distribusi data tidak normal.

Arikunto (2003: 388) mengemukakan bahwa statistik deskriptif berfungsi untuk mengelompokkan data, menggarap, menyimpulkan, memaparkan, serta menyajikan hasil olahan. Salah satu fungsi statistik yaitu statistik regresi atau statistik prediksi berfungsi untuk menentukan nilai Y bagi benda, hal atau individu apabila telah diketahui nilai X dari benda, hal atau individu tersebut.

Metoda analisis dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana, dimana yang menjadi variabel bebas (independen) adalah penyertaan modal (X) diuji secara terpisah satu persatu untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel terikat (dependen) yaitu pertumbuhan aktiva (Y1), efisiensi (Y2), dan kinerja keuangan (Y3).

Persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = a+bX$$

Y = Variabel dependen

a = Konstanta

b = Koefisien variabel independen

X = variabel independen

Uji hipotesis atau uji pengaruh digunakan untuk mengetahui koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan :

- 1) Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel (Uji t)

Dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah :

- a) Jika nilai t hitung  $\geq$  t tabel, maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima.

Harga t yang dapat dikonsultasikan dengan harga t-tabel apabila harga t-hitung sama dengan atau lebih besar dari harga t-tabel pada taraf signifikansi 5%, maka antara variabel bebas dengan variabel terikat berpengaruh secara signifikan.

- b) Jika nilai t hitung  $\leq$  t tabel, maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak.

Apabila harga t-hitung kurang dari harga t-tabel pada taraf signifikansi 5%, maka antara variabel bebas terhadap variabel terikat tidak berpengaruh secara signifikan.

- 2) Membandingkan nilai signifikansi (Sig.) dengan 0,05

Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dengan melihat signifikansi (Sig.), hasil output SPSS adalah :

- a) Jika nilai signifikansi (Sig.)  $\leq$  dari probabilitas 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima (hubungan X dan Y adalah signifikan)
- b) Jika nilai signifikansi (Sig.)  $\geq$  dari probabilitas 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak (hubungan X dan Y adalah tidak signifikan)

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum PD BPR BKK Wonosobo

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah, berjarak 120 Km dari Ibu Kota Jawa Tengah (Semarang) dan 520 Km dari Ibu Kota Negara (Jakarta). Secara administratif Kabupaten Wonosobo berbatasan langsung dengan tujuh Kabupaten yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Kabupaten Wonosobo terbagi dalam 15 Kecamatan, 236 Desa dan 29 Kelurahan. Adapun ke-15 Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kepil, Kecamatan Kertek, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Wadaslintang, Kecamatan Leksono, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Selomerto, Kecamatan Garung, Kecamatan Kejajar, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Mojotengah, dan Kecamatan Sukoharjo.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan sebagai pembiayaan terhadap pemberdayaan dan pembangunan di daerah secara adil dan merata perlu dilakukan dengan memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui setoran deviden. Salah satu Perusahaan Daerah yang menjadi andalan dan diharapkan kontribusinya di Kabupaten Wonosobo adalah PD BPR BKK Wonosobo yang merupakan hasil merger 9 (sembilan) BPR BKK di Wonosobo, yaitu BPR BKK Wonosobo, BPR BKK Watumalang, BPR BKK Kejajar, BPR BKK Garung, BPR BKK Selomerto, BPR BKK Leksono, BPR BKK Sapuran, BPR BKK Kaliwiro dan BPR BKK Wadaslintang.

PD. BPR BKK Wonosobo adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah yang kepemilikan sahamnya ditopang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (51%) dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (49%) dengan badan hukum berbentuk Perusahaan Daerah (PD). Keberadaan PD. BPR BKK Wonosobo sudah sejak Tahun 1970-an yang pada masa itu lebih dikenal dengan Badan Kredit Kecamatan (BKK). Lembaga Perbankan ini resmi karena proses berdirinya diatur berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan juga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKK di Provinsi Jawa Tengah.



Dengan Visi : “Menjadi BPR yang Kompetitif dengan Rating Sehat serta Efisien” dan juga Misi : “Menuju Terwujudnya BPR yang Tumbuh dan Berkembang, Mampu Memberikan Kontribusi Kepada Pemegang Saham, Pihak Internal dan Nasabah Melalui Kegiatan Operasional yang Profesional”, fungsi PD BPR BKK Wonosobo tidak hanya menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah saja, akan tetapi juga menerima simpanan/ tabungan dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelayanan mendasarkan pada Motto 3M, yaitu : Mudah (Persyaratannya), Murah (Biayanya), Mengarah (Tujuannya) dan juga menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, PD BPR BKK Wonosobo selalu mengerti akan kebutuhan nasabah.

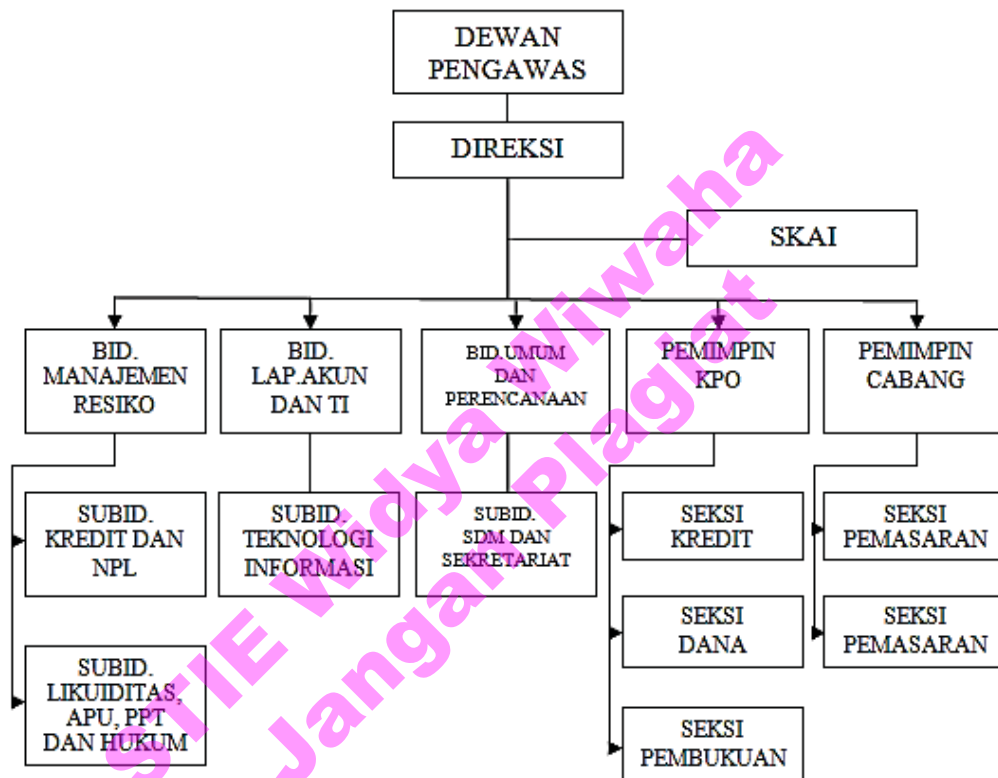
Gambar 4.1  
Logo PD BPR BKK Wonosobo



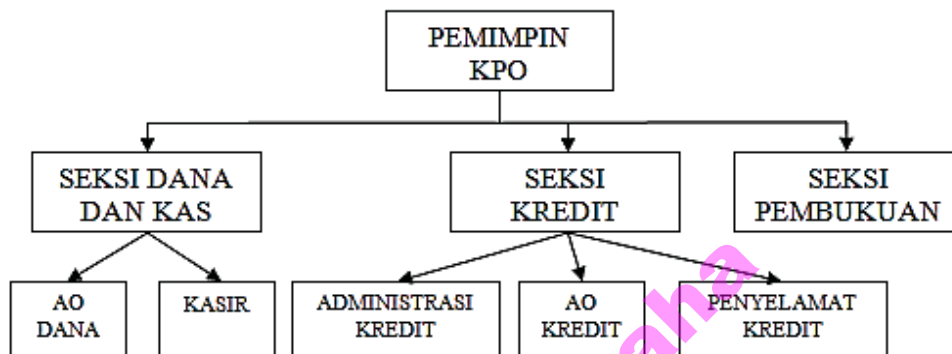
Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan tata kerja maka perlu adanya struktur organisasi pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKK Wonosobo. Adapun struktur organisasi PD BPR BKK Wonosobo

berdasarkan Keputusan Direksi PD BPR BKK Wonosobo Kabupaten Wonosobo Nomor 581/070/Kep.Dir/BPR-BKK/II/2013 adalah sebagai berikut :

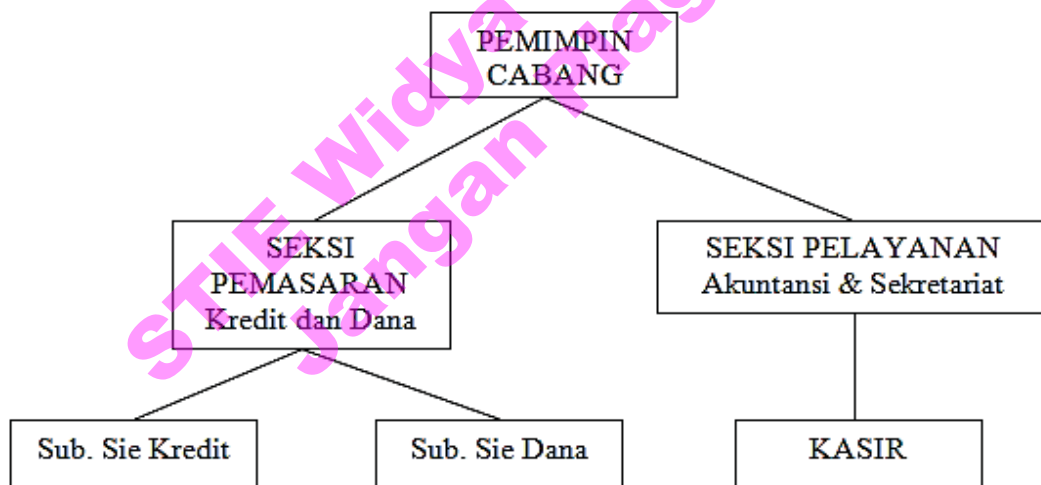
Gambar 4.2  
Bagan Struktur Organisasi PD BPR BKK Wonosobo



Gambar 4.3  
 Bagan Struktur Organisasi Kantor Pusat Operasional  
 PD BPR BKK Wonosobo



Gambar 4.4  
 Bagan Struktur Organisasi Kantor Cabang  
 PD BPR BKK Wonosobo



Jaringan Kantor PD. BPR BKK Wonosobo yaitu :

1. Kantor Pusat  
 Jl. Ahmad Yani No.84A Sapen Wonosobo (0286) 324063
2. Kantor Cabang Kejajar  
 Jl. Dieng Km.17 Kejajar (0286) 3326510

3. Kantor Cabang Kaliwiro  
Jl. Selomanik 1 Kaliwiro (0286) 5821577
4. Kantor Cabang Selomerto  
Jl. Banyumas Km.6 Selomerto (0286) 324892
5. Kantor Cabang Sapuran  
Jl. Purworejo No,948 Sapuran (0286) 611192
6. Kantor Cabang Watumalang  
Jl. Jebeg Lintang Watumalang (0286) 5835211
7. Kantor Cabang Wadaslintang  
Jl. Prembun Km.36 Wadaslintang 08112626641
8. Kantor Cabang Garung  
Jl. Dieng Km.8,5 Garung (0286) 3325817
9. Kantor Cabang Leksono  
Kompleks Kantor Kecamatan Leksono (0286) 3320296

#### **4.2 Gambaran Umum PT BPD Jawa Tengah**

Awal mula Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. DU57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha Menteri Urusan Bank Sentral No.4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah. Operasional pertama dimulai pada tanggal 6

April 1963 dengan menempati Gedung Bapindo, Jl.Pahlawan No.3 Semarang sebagai Kantor Pusat.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota/ Kabupaten Se-Jawa Tengah. Sejak didirikan Bank Jateng belum pernah mengalami perubahan nama. Pada Tahun 1969, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.3 Tahun 1969. Untuk selanjutnya melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.1 Tahun 1993, berubah menjadi Perusahaan Daerah (Perusda) yang semula berstatus badan usaha Bank. Sampai akhirnya pada tahun 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.6 Tahun 1998 dan Akte Pendirian No.1 tanggal 1 Mei 1999 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2.8223.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 15 Mei 1999, Bank kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas.

Pada Tanggal 7 Mei 1999, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengikuti program Rekapitalisasi Perbankan dan selesai pada tanggal 7 Mei 2005 disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota Se-Jawa Tengah. Seiring dengan terus berkembangnya perusahaan dan untuk lebih menampilkan citra positif setelah menyelesaikan program rekapitalisasi, maka pihak manajemen berkeinginan untuk mengubah logo dan *call name* perusahaan

yang mempresentasikan wajah baru PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.68 tanggal 7 Mei 2005 Notaris Prof.DR. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.C.17331 HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Juni 2005 maka nama sebutan (*call name*) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berubah dari sebelumnya Bank BPD Jateng menjadi Bank Jateng.

Gambar 4.5  
Logo PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah



Struktur Grup Bank Jateng adalah 53,29% Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 38,71% Pemerintah Kabupaten Se-Jawa Tengah dan 7,99% Pemerintah Kota Se-Jawa Tengah. Rincian nama pemegang saham Bank Jateng adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Pemegang Saham Bank Jateng

NO	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
1	Pemprov Jawa Tengah	995.721.000.000	53.29
2	Pemkot Semarang	64.961.000.000	3.48
3	Pemkab Cilacap	40.203.000.000	2.15
4	Pemkab Pati	40.000.000.000	2.14
5	Pemkab Pemasang	39.375.000.000	2.11
6	Pemkab Sukoharjo	36.000.000.000	1.93
7	Pemkab Demak	34.839.000.000	1.86

NO	Pemegang Saham	Nominal (Rp)	%
8	Pemkab Wonogiri	34.828.000.000	1.86
9	Pemkab Kendal	34.350.000.000	1.84
10	Pemkab Purworejo	32.680.000.000	1.75
11	Pemkab Tegal	32.140.000.000	1.72
12	Pemkab Banjarnegara	30.679.000.000	1.64
13	Pemkab Grobogan	28.237.000.000	1.51
14	Pemkot Salatiga	25.960.000.000	1.39
15	Pemkab Wonosobo	24.768.000.000	1.33
16	Pemkab Semarang	23.100.000.000	1.24
17	Pemkab Sragen	22.285.000.000	1.19
18	Pemkab Kebumen	21.180.000.000	1.13
19	Pemkot Surakarta	21.150.000.000	1.13
20	Pemkab Temanggung	20.895.000.000	1.12
21	Pemkab Banyumas	20.679.000.000	1.11
22	Pemkab Kudus	20.352.000.000	1.09
23	Pemkab Purbalingga	19.739.000.000	1.06
24	Pemkab Blora	19.480.000.000	1.04
25	Pemkab Klaten	19.344.000.000	1.04
26	Pemkab Boyolali	19.143.000.000	1.02
27	Pemkab Pekalongan	18.240.000.000	0.98
28	Pemkab Rembang	18.119.000.000	0.97
29	Pemkab Karanganyar	16.865.000.000	0.90
30	Pemkot Tegal	16.655.000.000	0.89
31	Pemkab Batang	15.334.000.000	0.82
32	Pemkab Brebes	14.508.000.000	0.78
33	Pemkab Magelang	13.431.000.000	0.72
34	Pemkab Jepara	12.590.000.000	0.67
35	Pemkot Magelang	11.925.000.000	0.64
36	Pemkot Pekalongan	8.734.000.000	0.47

(Sumber : Annual Report Bank Jateng, 2016: 179)

Bank Jateng memiliki visi : “Bank Terpercaya, Menjadi Kebanggaan Masyarakat, Mampu Menunjang Pembangunan” dan misi sebagai berikut :

1. Memberikan layanan prima yang didukung oleh kehandalan SDM dengan teknologi modern serta jaringan yang luas
2. Membangun budaya bank dan mempertahankan bank sehat
3. Mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan retail banking
4. Meningkatkan kontribusi dan komitmen pemilik guna memperkokoh bank.

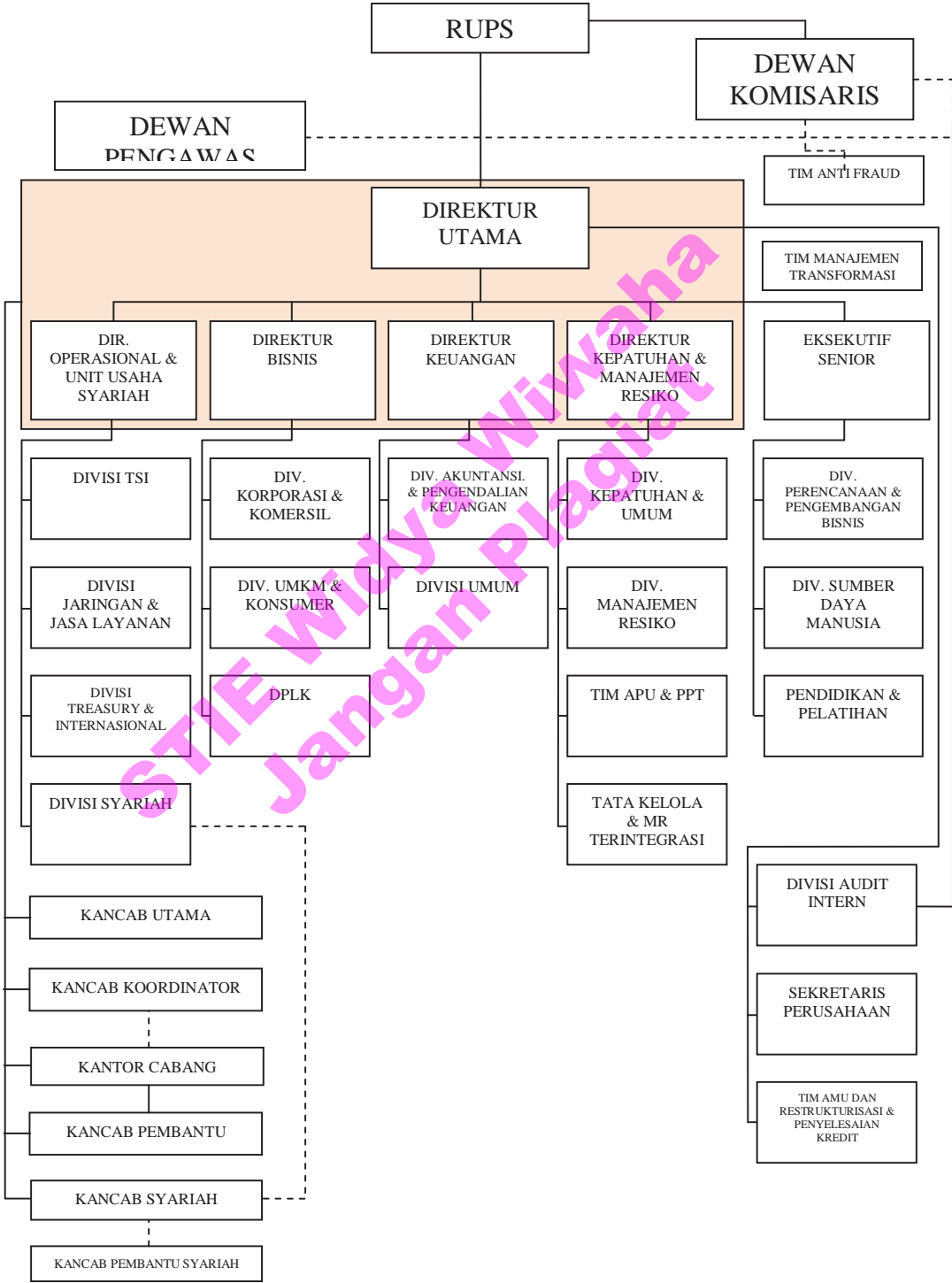
Sebagai Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota/ Kabupaten Se-Jawa Tengah, Bank Jateng berupaya dalam membangun perekonomian masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 1999, Bank Jateng memiliki tugas pokok untuk mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah dengan melaksanakan tugas pokok sebagai :

- a. Pendorong terciptanya tingkat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
- b. Pemegang kas daerah dan atau sebagai pengelola keuangan daerah
- c. Salah satu sumber pendapatan asli daerah

Struktur organisasi Bank Jateng ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No.0166/HT.01.01/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Struktur Organisasi Bank Jateng adalah sebagai berikut :



Gambar 4.6  
Struktur Organisasi PT BPD Jawa Tengah



Jaringan Kantor PT. BPD Jawa Tengah di Kabupaten Wonosobo yaitu :

1. Kantor Cabang Wonosobo  
Jl. Kartini No.1 Wonosobo (0286) 321500
2. Kantor Cabang Pembantu Pasar Kertek Wonosobo  
Jl. Raya Wonosobo Km.8 Kertek (0286) 329234
3. Kantor Cabang Pembantu Kaliwiro Wonosobo  
Jl. Selomanik Dusun Kalijati RT 8 RW 5 Kaliwiro (0286) 5832907
4. Kantor Kas Pemkab Wonosobo  
Jl. Sindoro No.2-4 Wonosobo (0286) 321500
5. Kantor Kas RSUD Wonosobo  
Jl. Rumah Sakit No.1 Wonosobo (0286) 321091
6. Kantor Kas UNSIQ Wonosobo  
Jl. Raya Kalibeber Km.4 Wonosobo (0286) 321500
7. Kantor Kas Garung Wonosobo  
Jl. Raya Dieng Km.11 Garung Wonosobo (0286) 321500

#### **4.3 Gambaran Umum PD BPR Bank Wonosobo**

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo (PD BPR Bank Wonosobo) adalah perusahaan perbankan milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang didirikan pada tahun 1981 dengan nama PD BPR Bank Pasar Kabupaten. Status Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Wonosobo ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 188.4.5 tahun

1981, dan izin Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KET-140/MK.11/1984 tanggal 11 April 1984. Pada saat pendiriannya, PD BPR Bank Pasar Kabupaten Wonosobo bertujuan untuk mendorong laju pembangunan daerah di segala bidang sekaligus menjadi pilar pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Wonosobo.

Tahun 2009 berdasarkan Peraturan Daerah No. 20 tahun 2008, dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan SK Bank Indonesia No.11/2/KEP.BI/Sm/Ekstern/2009 tertanggal 9 Juli 2009, PD BPR Bank Pasar Kabupaten Wonosobo hadir dengan nama baru yaitu PD BPR Bank Wonosobo. Perubahan nama yang sekaligus diiringi perubahan logo baru ini benar-benar mencerminkan tumbuhnya sebuah semangat baru di perusahaan ini untuk membangun jati dirinya menjadi perusahaan yang berdedikasi tinggi pada pemberdayaan masyarakat ekonomi kerakyatan di pedesaan.

Semangat baru ini pula yang saat ini sedang terus ditumbuhkan agar selalu menjadi asset penting dalam memberikan layanan prima kepada seluruh nasabah, serta dapat menjadi salah satu alternatif solusi berbagai persoalan perekonomian yang ada di Kabupaten Wonosobo yang beberapa diantaranya adalah :

1. Memberantas lintah darat/ pelepas uang yang beroperasi di wilayah kerja pemerintah daerah terutama di pasar-pasar
2. Menambah pendapatan pemerintah daerah

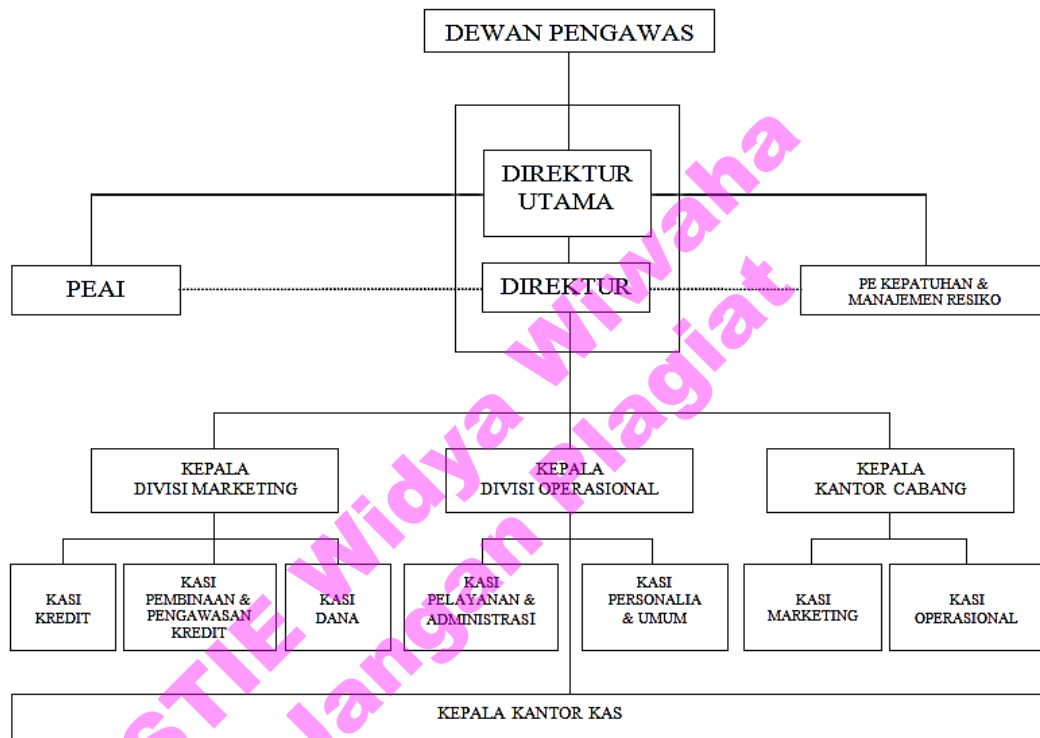
3. Memberikan pinjaman terutama guna menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan kepada pedagang, pengusaha ekonomi lemah di kompleks-komplek pasar dan tempat-tempat lain
4. Memberikan pinjaman kepada PNS, ABRI, Perangkat Desa dan masyarakat umum
5. Menyalurkan potensi ekonomi masyarakat dengan menerima simpanan uang.

Adapun tujuan PD BPR Bank Wonosobo antara lain ditetapkan sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
2. Menyalurkan kredit dan memberikan pembinaan terhadap masyarakat
3. Menyalurkan kredit dan memberikan pembinaan terhadap masyarakat
4. Melakukan kerjasama antar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dengan Lembaga Perbankan atau Keuangan lainnya
5. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PD BPR Bank Wonosobo memiliki visi: “Menjadi BPR Terbaik yang Membanggakan” dan misi: “Memiliki Kinerja Terbaik Diantaranya BPR Memberikan Deviden yang Tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Memiliki Reputasi yang Baik dan Menjadi Pilihan Utama Masyarakat Wonosobo dan Sekitarnya.”

Gambar 4.7  
Logo dan Struktur Organisasi PD BPR Bank Wonosobo



#### 4.4 Analisis Data

Berikut ini data dari masing-masing objek penelitian :

Tabel 4.2  
Laporan Neraca dan Laba Rugi PD BPR BKK Wonosobo  
(Data Diolah)

LAPORAN NERACA DAN LABA RUGI  
PD BPR BKK WONOSOBO  
2011 – 2015

(Dalam Juta Rupiah)

NERACA	2011	2012	2013	2014	2015
TOTAL ASET	38.195	45.749	54.648	78.260	96.479
Liabilitas	28.349	34.380	42.350	61.696	77.297
Ekuitas	9.846	11.369	12.298	16.564	19.182
TOTAL Liabilitas dan Ekuitas	38.195	45.749	54.648	78.260	96.479
LABA RUGI	2011	2012	2013	2014	2015
Pendapatan Bunga	6.637	7.769	9.485	12.346	15.801
Pendapatan Operasional Lain	351	359	448	260	455
Pendapatan Non Operasional	38	202	18	27	47
TOTAL PENDAPATAN	7.026	8.330	9.951	12.633	16.303
Beban Bunga	1.695	1.954	1.923	3.181	5.025
Beban Operasional Lain	3.418	4.129	5.588	6.701	7.850
Beban Non Operasional	87	577	178	126	407
TOTAL BEBAN	5.200	6.660	7.689	10.008	13.282
LABA RUGI Sebelum Pajak	1.826	1.670	2.262	2.625	3.021
Pajak Penghasilan	43	209	429	532	650
LABA RUGI BERSIH	1.783	1.461	1.833	2.093	2.371

(Sumber : Laporan Publikasi Triwulanan OJK 2011-2015, Data diolah)

Tabel 4.3  
Laporan Neraca dan Laba Rugi PT BPD Jawa Tengah  
(Data Diolah)

LAPORAN NERACA DAN LABA RUGI  
PT BPD JAWA TENGAH  
2011 – 2015

(Dalam Juta Rupiah)

NERACA	2011	2012	2013	2014	2015
TOTAL ASET	22.982.127	26.483.003	30.695.212	35.487.912	40.923.960
Liabilitas	20.953.099	24.100.271	27.986.165	32.473.483	37.253.023
Ekuitas	2.029.028	2.382.732	2.709.047	3.014.429	3.670.937
TOTAL Liabilitas dan Ekuitas	22.982.127	26.483.003	30.695.212	35.487.912	40.923.960
LABA RUGI	2011	2012	2013	2014	2015
Pendapatan Bunga	2.619.379	2.990.374	3.383.725	3.920.137	4.663.528
Pendapatan Operasional Lain	156.459	255.044	174.803	283.766	262.949
Pendapatan Non Operasional	2.247	335	2.947	12.206	3.589
TOTAL PENDAPATAN	2.778.085	3.245.753	3.561.475	4.216.109	4.930.066
Beban Bunga	1.150.877	1.203.657	1.277.704	1.679.127	2.049.349
Beban Operasional Lain	1.045.175	1.274.198	1.315.855	1.502.161	1.695.736
Beban Non Operasional	9.938	9.689	15.117	132	46.367
TOTAL BEBAN	2.205.990	2.487.544	2.608.676	3.181.420	3.791.452
LABA RUGI Sebelum Pajak	572.095	758.209	952.799	1.034.689	1.138.614
Pajak Penghasilan	161.767	195.788	247.758	292.841	323.437
LABA RUGI BERSIH	410.328	562.421	705.041	741.848	815.177

(Sumber : Annual Report PT BPD Jateng 2011-2015, Data diolah)

Tabel 4.4  
Laporan Neraca dan Laba Rugi PD BPR Bank Wonosobo  
(Data Diolah)

LAPORAN NERACA DAN LABA RUGI  
PD BPR BANK WONOSOBO  
2011 – 2015

(Dalam Juta Rupiah)

NERACA	2011	2012	2013	2014	2015
TOTAL ASET	67.972	88.362	113.458	146.059	207.435
Liabilitas	59.397	78.481	101.014	122.825	182.048
Ekuitas	8.575	9.881	12.444	23.234	25.387
TOTAL Liabilitas dan Ekuitas	67.972	88.362	113.458	146.059	207.435
LABA RUGI	2011	2012	2013	2014	2015
Pendapatan Bunga	10.257	13.496	15.624	20.551	28.615
Pendapatan Operasional Lain	259	187	380	171	174
Pendapatan Non Operasional	86	55	9	11	32
TOTAL PENDAPATAN	10.602	13.738	16.013	20.733	28.821
Beban Bunga	4.469	4.912	6.078	7.228	11.035
Beban Operasional Lain	3.537	5.147	5.180	7.532	10.460
Beban Non Operasional	33	59	39	69	61
TOTAL BEBAN	8.039	10.118	11.297	14.829	21.556
LABA RUGI Sebelum Pajak	2.563	3.620	4.716	5.904	7.265
Pajak Penghasilan	510	774	1.019	1.341	1.690
LABA RUGI BERSIH	2.053	2.846	3.697	4.563	5.575

(Sumber : Laporan Publikasi Triwulanan OJK 2011-2015, Data diolah)



#### 4.4.1 Deskripsi Data

Hasil pengukuran operasional variabel dari data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5  
Hasil Perhitungan Operasional Variabel Penyertaan Modal

TAHUN BUKU	PD BPR BKK WONOSOBO			PT BPD JAWA TENGAH		
	Ekuitas	Total Aktiva	Penyertaan Modal	Ekuitas	Total Aktiva	Penyertaan Modal
2011	9.846	38.195	0,26	2.029.028	22.982.127	0,09
2012	11.369	45.749	0,25	2.382.732	26.483.003	0,09
2013	12.298	54.648	0,23	2.709.047	30.695.212	0,09
2014	16.564	78.260	0,21	3.014.429	35.487.912	0,08
2015	19.182	96.479	0,20	3.670.937	40.923.960	0,09

TAHUN BUKU	PD BPR BANK WONOSOBO		
	Ekuitas	Total Aktiva	Penyertaan Modal
2011	8.575	67.972	0,13
2012	9.881	88.362	0,11
2013	12.444	113.458	0,11
2014	23.234	146.059	0,16
2015	25.387	207.435	0,12

Tabel 4.6  
Hasil Perhitungan Operasional Variabel Pertumbuhan Aktiva

TAHUN BUKU	PD BPR BKK WONOSOBO			PT BPD JAWA TENGAH		
	Aset tahun t	Aset tahun t-1	Pertumbuhan Aktiva	Aset tahun t	Aset tahun t-1	Pertumbuhan Aktiva
2011	38.195	27.126	0,41	22.982.127	18.812.168	0,22
2012	45.749	38.195	0,20	26.483.003	22.982.127	0,15
2013	54.648	45.749	0,19	30.695.212	26.483.003	0,16
2014	78.260	54.648	0,43	35.487.912	30.695.212	0,16
2015	96.479	78.260	0,23	40.923.960	35.487.912	0,15

TAHUN BUKU	PD BPR BANK WONOSOBO		
	Aset tahun t	Aset tahun t-1	Pertumbuhan Aktiva
2011	67.972	60.643	0,12
2012	88.362	67.972	0,30
2013	113.458	88.362	0,28
2014	146.059	113.458	0,29
2015	207.435	146.059	0,42

Tabel 4.7  
Hasil Perhitungan Operasional Variabel Efisiensi

TAHUN BUKU	PD BPR BKK WONOSOBO			PT BPD JAWA TENGAH		
	Total Biaya	Total Pendapatan	Efisiensi	Total Biaya	Total Pendapatan	Efisiensi
2011	5.200	7.026	0,74	2.205.990	2.778.085	0,79
2012	6.660	8.330	0,80	2.487.544	3.245.753	0,77
2013	7.689	9.951	0,77	2.608.676	3.561.475	0,73
2014	10.008	12.633	0,79	3.181.420	4.216.109	0,75
2015	13.282	16.303	0,81	3.791.452	4.930.066	0,77

TAHUN BUKU	PD BPR BANK WONOSOBO		
	Total Biaya	Total Pendapatan	Efisiensi
2011	8.039	10.602	0,76
2012	10.118	13.738	0,74
2013	11.297	16.013	0,71
2014	14.829	20.733	0,72
2015	21.556	28.821	0,75

Tabel 4.8  
Hasil Perhitungan Operasional Variabel Kinerja Keuangan

TAHUN BUKU	PD BPR BKK WONOSOBO			PT BPD JAWA TENGAH		
	Net Income	Ekuitas	Kinerja Keuangan	Net Income	Ekuitas	Kinerja Keuangan
2011	1.783	9.846	0,18	410.328	2.029.028	0,20
2012	1.461	11.369	0,13	562.421	2.382.732	0,24
2013	1.833	12.298	0,15	705.041	2.709.047	0,26
2014	2.093	16.564	0,13	741.848	3.014.429	0,25
2015	2.371	19.182	0,12	815.177	3.670.937	0,22

TAHUN BUKU	PD BPR BANK WONOSOBO		
	Net Income	Ekuitas	Kinerja Keuangan
2011	2.053	8.575	0,24
2012	2.846	9.881	0,29
2013	3.697	12.444	0,30
2014	4.563	23.234	0,20
2015	5.575	25.387	0,22

#### 4.4.2 Uji Normalitas Data

Dari hasil operasional variabel yang menjadi data akhir yang digunakan, dilakukan uji normalitas data menggunakan uji *kolmogrov-smirnov*.

Tabel 4.9  
Hasil Perhitungan Operasional Variabel Tiga Objek Penelitian

TAHUN BUKU	PD BPR BKK WONOSOBO			
	Penyertaan Modal	Pertumbuhan Aktiva	Efisiensi	Kinerja Keuangan
2011	0,26	0,41	0,74	0,18
2012	0,25	0,20	0,80	0,13
2013	0,23	0,19	0,77	0,15
2014	0,21	0,43	0,79	0,13
2015	0,20	0,23	0,81	0,12

TAHUN BUKU	PT BPD JAWA TENGAH			
	Penyertaan Modal	Pertumbuhan Aktiva	Efisiensi	Kinerja Keuangan
2011	0,09	0,22	0,79	0,20
2012	0,09	0,15	0,77	0,24
2013	0,09	0,16	0,73	0,26
2014	0,08	0,16	0,75	0,25
2015	0,09	0,15	0,77	0,22

TAHUN BUKU	PD BPR BANK WONOSOBO			
	Penyertaan Modal	Pertumbuhan Aktiva	Efisiensi	Kinerja Keuangan
2011	0,13	0,12	0,76	0,24
2012	0,11	0,30	0,74	0,29
2013	0,11	0,28	0,71	0,30
2014	0,16	0,29	0,72	0,20
2015	0,12	0,42	0,75	0,22

Hasil uji normalitas data masing-masing variabel penelitian sebagai berikut :

1. PD BPR BKK WONOSOBO

Penyertaan Modal terhadap :

- a. Pertumbuhan Aktiva :  $0,850 > 0,05$  (data normal)
- b. Efisiensi :  $0,960 > 0,05$  (data normal)
- c. Kinerja Keuangan :  $0,861 > 0,05$  (data normal)

2. PT BPD JAWA TENGAH

Penyertaan Modal terhadap :

- a. Pertumbuhan Aktiva :  $1,000 > 0,05$  (data normal)
- b. Efisiensi :  $0,759 > 0,05$  (data normal)
- c. Kinerja Keuangan :  $0,759 > 0,05$  (data normal)

### 3. PD BPR BANK WONOSOBO

Penyertaan Modal terhadap :

- a. Pertumbuhan Aktiva : 0,933 > 0,05 (data normal)
- b. Efisiensi : 1,000 > 0,05 (data normal)
- c. Kinerja Keuangan : 0,912 > 0,05 (data normal)

## 4.5 Pengujian Regresi Linier Sederhana

### 4.5.1 Uji Regresi Pengaruh Penyertaan Modal (X) Terhadap Pertumbuhan Aktiva (Y1) Pada PD BPR BKK Wonosobo Tahun 2011-2015

Tabel 4.10  
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana PD BPR BKK Wonosobo  
(Penyertaan Modal dan Pertumbuhan Aktiva)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.221	.616		.359	.743
	Penyertaan Modal	.308	2.666	.066	.115	.915

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Aktiva

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.066 <sup>a</sup>	.004	-.327	.13593

a. Predictors: (Constant), Penyertaan Modal

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Aktiva

- a. Persamaan Regresi :  $Y_1 = 0,221 + 0,308 X$

Pengaruh variabel penyertaan modal terhadap variabel pertumbuhan aktiva adalah positif, menunjukkan bahwa kenaikan dari penyertaan modal akan

diikuti oleh kenaikan pertumbuhan aktiva. Nilai pendugaan sebesar 0,308 menunjukkan besaran pengaruh penyertaan modal terhadap pertumbuhan aktiva.

b. Hasil Uji nilai t :

Berdasarkan output di atas diketahui nilai t hitung sebesar  $0,115 < \text{nilai } t \text{ tabel } 3,182$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

c. Nilai Probabilitas :

*P-value* sebesar  $0,915 > 0,05$  menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh penyertaan modal terhadap pertumbuhan aktiva, sehingga hipotesis ditolak.

R Square menunjukkan angka 0,004 artinya bahwa penyertaan modal memberikan kontribusi sebesar 0,004 atau 0,4% terhadap pertumbuhan aktiva. Sedangkan 99,96% pertumbuhan aktiva dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terangkum dalam penelitian ini.

**4.5.2 Uji Regresi Pengaruh Penyertaan Modal (X) Terhadap Efisiensi (Y2)  
Pada PD BPR BKK Wonosobo Tahun 2011-2015**

Tabel 4.11  
 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana PD BPR BKK Wonosobo  
 (Penyertaan Modal dan Efisiensi)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.950	.108		8.827	.003
	Penyertaan Modal	-.731	.466	-.671	-1.569	.215

a. Dependent Variable: Efisiensi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.671 <sup>a</sup>	.451	.268	.02375

a. Predictors: (Constant), Penyertaan Modal

b. Dependent Variable: Efisiensi

a. Persamaan Regresi :  $Y_2 = 0,950 + (-0,731) X$

Pengaruh variabel penyertaan modal terhadap variabel efisiensi adalah negatif. Menunjukkan bahwa jika penyertaan modal meningkat sebesar satu satuan, maka efisiensi akan menurun sebesar 0,731. Artinya jika penyertaan modal naik sebesar 0,731 maka efisiensinya justru akan menurun sebesar 0,731.

b. Hasil Uji nilai t :

Berdasarkan output di atas diketahui nilai t hitung sebesar  $-1,569 <$  nilai t tabel 3,182 maka  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak.

c. Nilai Probabilitas :

*P-value* sebesar  $0,215 > 0,05$  menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh penyertaan modal terhadap efisiensi, sehingga hipotesis ditolak.

R Square menunjukkan angka 0,451 artinya bahwa penyertaan modal memberikan kontribusi sebesar 0,451 atau 45,1% terhadap efisiensi. Sedangkan 54,9% efisiensi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terangkum dalam penelitian ini.

#### 4.5.3 Uji Regresi Pengaruh Penyertaan Modal (X) Terhadap Kinerja Keuangan (Y3) Pada PD BPR BKK Wonosobo Tahun 2011-2015

Tabel 4.12  
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana PD BPR BKK Wonosobo  
(Penyertaan Modal dan Kinerja Keuangan)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.017	.084		-.205	.851
	Penyertaan Modal	.692	.364	.739	1.902	.153

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.739 <sup>a</sup>	.547	.395	.01856

a. Predictors: (Constant), Penyertaan Modal

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

a. Persamaan Regresi :  $Y_3 = -0,017 + 0,692 X$

Pengaruh variabel penyertaan modal terhadap variabel kinerja keuangan adalah positif, menunjukkan bahwa kenaikan dari penyertaan modal akan



diikuti oleh kenaikan pertumbuhan aktiva. Nilai pendugaan sebesar 0,692 menunjukkan besaran pengaruh penyertaan modal terhadap kinerja keuangan.

b. Hasil Uji nilai t :

Berdasarkan output di atas diketahui nilai t hitung sebesar  $1,902 < \text{nilai } t \text{ tabel } 3,182$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak.

c. Nilai Probabilitas :

*P-value* sebesar  $0,153 > 0,05$  menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh penyertaan modal terhadap kinerja keuangan, sehingga hipotesis ditolak.

R Square menunjukkan angka 0,547 artinya bahwa penyertaan modal memberikan kontribusi sebesar 0,547 atau 54,7% terhadap kinerja keuangan. Sedangkan 45,3% kinerja keuangan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terangkum dalam penelitian ini.

#### **4.5.4 Uji Regresi Pengaruh Penyertaan Modal (X) Terhadap Pertumbuhan Aktiva (Y1) Pada PT BPD Jawa Tengah Tahun 2011-2015**

Tabel 4.13  
 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana PT BPD Jawa Tengah  
 (Penyertaan Modal dan Pertumbuhan Aktiva)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.080	.332		.241	.825
	Penyertaan Modal	1.000	3.764	.152	.266	.808

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Aktiva

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.152 <sup>a</sup>	.023	-.303	.03367

a. Predictors: (Constant), Penyertaan Modal

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Aktiva

a. Persamaan Regresi :  $Y_1 = 0,080 + 1,000 X$

Pengaruh variabel penyertaan modal terhadap variabel pertumbuhan aktiva adalah positif, menunjukkan bahwa kenaikan dari penyertaan modal akan diikuti oleh kenaikan pertumbuhan aktiva. Nilai pendugaan sebesar 1,000 menunjukkan besaran pengaruh penyertaan modal terhadap pertumbuhan aktiva.

b. Hasil Uji nilai t :

Berdasarkan output di atas diketahui nilai t hitung sebesar  $0,266 <$  nilai t tabel  $3,182$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

c. Nilai Probabilitas :

P-value sebesar 0,808 > 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh penyertaan modal terhadap pertumbuhan aktiva, sehingga hipotesis ditolak.

R Square menunjukkan angka 0,023 artinya bahwa penyertaan modal memberikan kontribusi sebesar 0,023 atau 2,3% terhadap pertumbuhan aktiva. Sedangkan 97,7% pertumbuhan aktiva dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terangkum dalam penelitian ini.

#### 4.5.5 Uji Regresi Pengaruh Penyertaan Modal (X) Terhadap Efisiensi (Y2) Pada PT BPD Jawa Tengah Tahun 2011-2015

Tabel 4.14  
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana PT BPD Jawa Tengah  
(Penyertaan Modal dan Efisiensi)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.630	.248		2.542	.085
	Penyertaan Modal	1.500	2.814	.294	.533	.631

a. Dependent Variable: Efisiensi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.294 <sup>a</sup>	.087	-.218	.02517

a. Predictors: (Constant), Penyertaan Modal

b. Dependent Variable: Efisiensi

a. Persamaan Regresi :  $Y_2 = 0,630 + 1,500 X$

Pengaruh variabel penyertaan modal terhadap variabel efisiensi adalah positif, menunjukkan bahwa kenaikan dari penyertaan modal akan diikuti oleh kenaikan efisiensi. Nilai pendugaan sebesar 1,500 menunjukkan besaran pengaruh penyertaan modal terhadap efisiensi.

b. Hasil Uji nilai t :

Berdasarkan output di atas diketahui nilai t hitung sebesar  $0,533 < \text{nilai } t \text{ tabel } 3,182$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak.

c. Nilai Probabilitas :

*P-value* sebesar  $0,631 > 0,05$  menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh penyertaan modal terhadap efisiensi , sehingga hipotesis ditolak.

R Square menunjukkan angka 0,087 artinya bahwa penyertaan modal memberikan kontribusi sebesar 0,087 atau 8,7% terhadap efisiensi. Sedangkan 91,3% efisiensi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terangkum dalam penelitian ini.

#### **4.5.6 Uji Regresi Pengaruh Penyertaan Modal (X) Terhadap Kinerja Keuangan (Y3) Pada PT BPD Jawa Tengah Tahun 2011-2015**

Tabel 4.15  
 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana PT BPD Jawa Tengah  
 (Penyertaan Modal dan Kinerja Keuangan)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.410	.254		1.612	.205
	Penyertaan Modal	-2.000	2.887	-.371	-.693	.538

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.371 <sup>a</sup>	.138	-.149	.02582

a. Predictors: (Constant), Penyertaan Modal

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

a. Persamaan Regresi :  $Y_3 = 0,410 + (-2,000) X$

Pengaruh variabel penyertaan modal terhadap variabel kinerja keuangan adalah negatif. Menunjukkan bahwa jika penyertaan modal meningkat sebesar satu satuan, maka kinerja keuangan akan menurun sebesar 2,000. Artinya jika penyertaan modal naik sebesar 2,000 maka kinerja keuangannya justru akan menurun sebesar 2,000.

b. Hasil Uji nilai t :

Berdasarkan output di atas diketahui nilai t hitung sebesar  $-0,693 < \text{nilai } t$  tabel 3,182 maka  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak.

c. Nilai Probabilitas :

*P-value* sebesar  $0,538 > 0,05$  menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh penyertaan modal terhadap kinerja keuangan , sehingga hipotesis ditolak.

R Square menunjukkan angka 0,138 artinya bahwa penyertaan modal memberikan kontribusi sebesar 0,138 atau 13,8% terhadap kinerja keuangan. Sedangkan 86,2% kinerja keuangan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terangkum dalam penelitian ini.

#### 4.5.7 Uji Regresi Pengaruh Penyertaan Modal (X) Terhadap Pertumbuhan Aktiva (Y1) Pada PD BPR Bank Wonosobo Tahun 2011-2015

Tabel 4.16  
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana PD BPR Bank Wonosobo  
(Penyertaan Modal dan Pertumbuhan Aktiva)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.389	.374		1.041	.375
	Penyertaan Modal	-.849	2.935	-.165	-.289	.791

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Aktiva

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.165 <sup>a</sup>	.027	-.297	.12171

a. Predictors: (Constant), Penyertaan Modal

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Aktiva

a. Persamaan Regresi :  $Y_1 = 0,389 + (- 0,849) X$

Pengaruh variabel penyertaan modal terhadap variabel pertumbuhan aktiva adalah negatif. Menunjukkan bahwa jika penyertaan modal meningkat sebesar satu satuan, maka pertumbuhan aktiva akan menurun sebesar 0,849. Artinya

jika penyertaan modal naik sebesar 0,849 maka pertumbuhan aktivasnya justru akan menurun sebesar 0,849.

b. Hasil Uji nilai t :

Berdasarkan output di atas diketahui nilai t hitung sebesar  $-0,289 < \text{nilai } t$  tabel 3,182 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

c. Nilai Probabilitas :

*P-value* sebesar  $0,791 > 0,05$  menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh penyertaan modal terhadap pertumbuhan aktiva, sehingga hipotesis ditolak.

R Square menunjukkan angka 0,027 artinya bahwa penyertaan modal memberikan kontribusi sebesar 0,027 atau 2,7% terhadap pertumbuhan aktiva. Sedangkan 97,3% pertumbuhan aktiva dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terangkum dalam penelitian ini.

**4.5.8 Uji Regresi Pengaruh Penyertaan Modal (X) Terhadap Efisiensi (Y2)  
Pada PD BPR Bank Wonosobo Tahun 2011-2015**

Tabel 4.17  
 Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana PD BPR Bank Wonosobo  
 (Penyertaan Modal dan Efisiensi)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.749	.073		10.245	.002
	Penyertaan Modal	-.105	.574	-.105	-.182	.867

a. Dependent Variable: Efisiensi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.105 <sup>a</sup>	.011	-.319	.02381

a. Predictors: (Constant), Penyertaan Modal

b. Dependent Variable: Efisiensi

a. Persamaan Regresi :  $Y_2 = 0,749 + (-0,105) X$

Pengaruh variabel penyertaan modal terhadap variabel efisiensi adalah negatif. Menunjukkan bahwa jika penyertaan modal meningkat sebesar satu satuan, maka efisiensi akan menurun sebesar 0,105. Artinya jika penyertaan modal naik sebesar 0,105 maka efisiensinya justru akan menurun sebesar 0,105.

b. Hasil Uji nilai t :

Berdasarkan output di atas diketahui nilai t hitung sebesar  $-0,182 <$  nilai t tabel 3,182 maka  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak.

c. Nilai Probabilitas :



P-value sebesar  $0,867 > 0,05$  menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh penyertaan modal terhadap efisiensi, sehingga hipotesis ditolak.

R Square menunjukkan angka 0,011 artinya bahwa penyertaan modal memberikan kontribusi sebesar 0,011 atau 1,1% terhadap efisiensi. Sedangkan 98,9% efisiensi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terangkum dalam penelitian ini.

#### 4.5.9 Uji Regresi Pengaruh Penyertaan Modal (X) Terhadap Kinerja Keuangan (Y3) Pada PD BPR Bank Wonosobo Tahun 2011-2015

Tabel 4.18  
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana PD BPR Bank Wonosobo  
(Penyertaan Modal dan Kinerja Keuangan)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.470	.086		5.446	.012
Penyertaan Modal	-1.744	.677	-.830	-2.575	.082

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.830 <sup>a</sup>	.688	.585	.02809

a. Predictors: (Constant), Penyertaan Modal

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

a. Persamaan Regresi :  $Y_3 = 0,470 + (-1,744) X$

Pengaruh variabel penyertaan modal terhadap variabel kinerja keuangan adalah negatif. Menunjukkan bahwa jika penyertaan modal meningkat sebesar satu satuan, maka kinerja keuangan akan menurun sebesar 1,744. Artinya jika penyertaan modal naik sebesar 1,744 maka kinerja keuangannya justru akan menurun sebesar 1,744.

b. Hasil Uji nilai t :

Berdasarkan output di atas diketahui nilai t hitung sebesar  $-2,575 < \text{nilai } t$  tabel 3,182 maka  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak.

c. Nilai Probabilitas :

*P-value* sebesar  $0,082 > 0,05$  menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh penyertaan modal terhadap kinerja keuangan, sehingga hipotesis ditolak.

R Square menunjukkan angka 0,688 artinya bahwa penyertaan modal memberikan kontribusi sebesar 0,688 atau 68,8% terhadap kinerja keuangan. Sedangkan 31,2% kinerja keuangan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terangkum dalam penelitian ini.

## 4.6 Pembahasan

### 4.6.1 Pengaruh Penyertaan Modal (X) Terhadap Pertumbuhan Aktiva (Y1) Pada Tiga BUMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2015

Diungkapkan oleh Sudarno, dkk (2011) bahwa penyertaan modal yang digunakan untuk melakukan investasi dalam aktiva akan meningkatkan produktifitas aktiva itu sendiri yang pada gilirannya akan meningkatkan kegiatan operasional perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada tiga BUMD Kabupaten Wonosobo tahun buku 2011-2015, menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh penyertaan modal terhadap pertumbuhan aktiva. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarno, dkk (2011) studi pada BUMD/Perusahaan Daerah di Provinsi Riau dan juga penelitian yang dilakukan oleh Kelbulan, Izak (2015) pada BUMD di Provinsi DIY. Kedua penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa penyertaan modal berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan aktiva. Semestinya BUMD/Perusahaan Daerah dapat menggunakan penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan aktiva sehingga penyertaan modal yang diberikan tersebut dapat bermanfaat dan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan.

#### **4.6.2 Pengaruh Penyertaan Modal (X) Terhadap Efisiensi (Y2) Pada Tiga BUMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2015**

Keterkaitan antara penyertaan modal dan efisiensi diungkapkan oleh Sudarno, dkk (2011) bahwa semakin besar penyertaan modal digunakan untuk meningkatkan investasi produktif diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan mengendalikan biaya, maka akan terjadi efisiensi yang tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada tiga BUMD Kabupaten Wonosobo tahun buku 2011-2015, menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh penyertaan modal terhadap efisiensi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarno, dkk (2011) studi pada BUMD/Perusahaan Daerah di Provinsi Riau dan juga penelitian yang dilakukan oleh Kelbulan, Izak (2015) pada BUMD di Provinsi DIY. Kedua penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa hubungan penyertaan modal dengan efisiensi memiliki hubungan yang negatif, artinya penyertaan modal berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan aktiva. Artinya BUMD/Perusahaan Daerah belum mampu menciptakan efisiensi dengan adanya penyertaan modal dari pemerintah daerah.

#### **4.6.3 Pengaruh Penyertaan Modal (X) Terhadap Kinerja Keuangan (Y3) Pada Tiga BUMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2015**

Menurut Sudarno, dkk (2011) bahwa semakin banyak penyertaan modal jika digunakan untuk investasi maka akan meningkatkan kegiatan operasional perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada tiga BUMD Kabupaten Wonosobo tahun buku 2011-2015, menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh penyertaan modal terhadap kinerja keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarno, dkk (2011) studi pada BUMD/Perusahaan Daerah

di Provinsi Riau dan juga penelitian yang dilakukan oleh Kelbulan, Izak (2015) pada BUMD di Provinsi DIY. Kedua penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa penyertaan modal belum mampu meningkatkan kinerja keuangan BUMD/Perusahaan Daerah. Keberadaan penyertaan modal semestinya mampu memberikan daya dorong yang kuat terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

#### **4.7 Pembahasan Menyeluruh Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Aktiva, Efisiensi, Dan Kinerja Keuangan BUMD di Kabupaten Wonosobo**

Tujuan penyertaan modal untuk investasi aktiva adalah untuk meningkatkan pertumbuhan aktiva produktif dan perkembangan pendapatan yang lebih besar. Pertumbuhan aktiva yang tinggi menunjukkan adanya tambahan investasi yang akan meningkatkan kegiatan operasional perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan. Apabila peningkatan pendapatan lebih besar daripada peningkatan biaya tentunya akan meningkatkan efisiensi. Kontribusi efisiensi terhadap kinerja keuangan berupa *Return on Equity* (ROE) dimana semakin rendah biaya semakin tinggi efisiensi dan kinerja keuangan tinggi. Sebaliknya semakin tinggi biaya maka semakin tidak efisien dan kinerja keuangan rendah.

Studi penelitian yang dilakukan di tiga BUMD di Kabupaten Wonosobo yaitu PD BPR BKK Wonosobo, PT BPD Jawa Tengah (Bank Jateng), dan PD

BPR Bank Wonosobo, ternyata menunjukkan hasil yang berbanding terbalik. Penyertaan modal tidak memiliki daya dorong kuat terhadap pertumbuhan aktiva. Hal ini dikarenakan setiap kali ada penambahan modal oleh pemerintah daerah sedikit digunakan untuk investasi dalam aktiva.

Penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah juga belum mampu menciptakan efisiensi. Cukup besarnya nilai penyertaan modal yang dikucurkan oleh pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan nilai ekuitas yang cenderung meningkat, juga disertai dengan jumlah biaya operasional dan non operasional yang lebih besar selama rentang waktu penelitian ini.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyertaan modal oleh pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Hubungan penyertaan modal dengan kinerja keuangan yang ditunjukkan oleh nilai *Return on Equity* (ROE) hasil penelitian ini menunjukkan hubungan yang negatif, penyertaan modal belum memiliki kemampuan kuat untuk meningkatkan kinerja keuangan. Sisi jumlah ekuitas meningkat tiap tahunnya tetapi kinerja keuangan BUMD mengalami penurunan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aktiva BUMD di Kabupaten Wonosobo.
2. Penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap efisiensi BUMD di Kabupaten Wonosobo.
3. Penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMD di Kabupaten Wonosobo.

Dari pengujian pengaruh penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah pada ketiga BUMD di Kabupaten Wonosobo, diperoleh hasil bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah memberikan kontribusi terbesar lebih kepada kinerja keuangan dibandingkan kontribusinya terhadap pertumbuhan aktiva dan efisiensi. Namun pengaruhnya adalah negatif.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya :

Penelitian ini melakukan studi pada BUMD di Kabupaten Wonosobo dengan obyek penelitian adalah tiga BUMD yang melakukan kegiatan usaha perbankan di daerah. Untuk itu perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah terhadap BUMD yang lebih mengutamakan kegiatan usaha di bidang pelayanan masyarakat di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Selain itu saran untuk penelitian selanjutnya juga agar menambah variabel independennya.

2. Bagi BUMD di Kabupaten Wonosobo :

- a. Fokus pada peningkatan pertumbuhan aktiva produktif sehingga penyertaan yang diberikan pemerintah daerah dapat bermanfaat dan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan.
- b. Membuat strategi efisiensi dengan meningkatkan investasi produktif yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan mengendalikan biaya.
- c. Melakukan kerjasama dengan universitas atau perguruan tinggi yang ada untuk membuat penelitian dan pengembangan BUMD agar terjadi peningkatan kinerja perusahaan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (2003), *Manajemen Penelitian Cetakan Keenam*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014*.
- Darminto, Dwi Prastowo (2011), *Analisis Laporan Keuangan : Konsep dan Aplikasi Edisi Ketiga*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul dan Icuk Rangga Bawono (2011), *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul, Yanuar E. Restianto dan I Wayan Karman (2010), *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kelbulan, Izak (2015), *Analisis Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Aktiva, Efisiensi dan Kinerja Keuangan BUMD di Provinsi DIY*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Keputusan Direksi Nomor 581/070/Kep.Dir/BPR-BKK/II/2013, Tentang *Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD.BPR BKK Wonosobo Kabupaten Wonosobo untuk Kantor Pusat Manajemen, Kantor Pusat Operasional dan Kantor Cabang*.
- Mahmudi (2010), *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Erlangga
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011, Tentang *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada Badan Usaha Milik Daerah*.
- Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, *Laporan Tahunan Annual Report 2011*.
- Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, *Laporan Tahunan Annual Report 2013*.
- Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, *Laporan Tahunan Annual Report 2016*.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Wonosobo, *Keputusan Direksi Nomor 581/070/Kep.Dir/BPR-BKK/II/2013.*

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Wonosobo, *Laporan Publikasi Triwulanan : Laporan Laba Rugi Desember 2011,OJK 2012.*

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Wonosobo, *Laporan Publikasi Triwulanan : Laporan Laba Rugi Desember 2013,OJK 2014.*

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Wonosobo, *Laporan Publikasi Triwulanan : Laporan Laba Rugi Desember 2015,OJK 2016.*

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo, *Laporan Publikasi Triwulanan : Laporan Laba Rugi Desember 2011,OJK 2012.*

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo, *Laporan Publikasi Triwulanan : Laporan Laba Rugi Desember 2013,OJK 2014.*

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo, *Laporan Publikasi Triwulanan : Laporan Laba Rugi Desember 2015,OJK 2016.*

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Wonosobo, *Laporan Publikasi Triwulanan : Laporan Neraca Desember 2011,OJK 2012.*

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Wonosobo, *Laporan Publikasi Triwulanan : Laporan Neraca Desember 2013,OJK 2014.*

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Wonosobo, *Laporan Publikasi Triwulanan : Laporan Neraca Desember 2015,OJK 2016.*

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo, *Laporan Publikasi Triwulanan : Laporan Neraca Desember 2011,OJK 2012.*

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo, *Laporan Publikasi Triwulanan : Laporan Neraca Desember 2013,OJK 2014.*

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Wonosobo, *Laporan Publikasi Triwulanan : Laporan Neraca Desember 2015*, OJK 2016.

Suara Merdeka 2016, *Pemprov Suntik Rp 50 M untuk BUMD*, <<http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pemprov-suntik-rp-50-m-untuk-bumd/>> [diakses 05 Februari 2017].

Sudarno, dkk (2011), *Pengaruh Penyertaan Modal terhadap Pertumbuhan Aktiva, Efisiensi dan Kinerja Keuangan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Studi pada BUMD/Perusahaan Daerah di Provinsi Riau)*, Jurnal Aplikasi Manajemen, Volume 9 Nomor 2.

Tulisan Hukum/BPK Perwakilan Provinsi Banten/Umum 2014, *Peranan Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah*, <<http://banten.bpk.go.id>> [diakses 18 September 2016].

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Tulisan Hukum/BPK Perwakilan Provinsi Banten/Umum 2014, *Peranan Badan Usaha*

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/default.aspx>